

E-NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi November IV 2020

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Munas V PKS

*Bersama Melayani
Rakyat*

Melintas Waktu Melayani Rakyat

Peluncuran lambang PKS dengan warna dasar putih, motif jingga dan hitam menjadi salah satu penanda kepengurusan Presiden Ahmad Syaikh yang Fresh dan simple. Sejatinya lambang baru telah lama di inisiasi oleh Presiden Muhammad Sohbil Iman bersamaan dengan Hymne dan Mars PKS. Tongkat Estafet terjadi dengan paripurna. InshaAllah bergerak lebih luas, berkolaborasi lebih inklusif dan melayani lebih luas.

Secara faktual masih ada yang belum bisa move on dengan lambang yang lama, meski tak menolak dengan apa yang baru. Wajar saja mungkin sedang menarik memori yang melintasi waktu, karena ada banyak suka duka dilewati dengan si kotak hitam dan bulan sabit berwarna kuning emas. Jatuh bangun, tersungkur bangkit dan tegak dalam dakwah. Percayalah, tidak ada yang tertinggal. Bismillah kita sedang melangkah dengan penuh kegembiraan.

Alhamdulillah Musyawarah Nasional (Munas) V PKS berjalan lancar dan sukses.

Kepengurusan baru telah disusun dan dilantik. Ditasbihkan dengan gelaran kolosal yang dihadiri kader, simpatisan dan para pemangku kepentingan secara langsung maupun virtual. Tumpah ruah kegembiraan dan khidmat dalam acara tersebut.

Pengurus dengan tuntunan Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf AlJufri mengucapkan Janji dihadapan ribuan pasang mata. Hitungan secara keseluruhan ada 31 persen keterwakilan perempuan dari Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Dewan Pengurus



Tagline “Bersama Melayani Rakyat” tidak sekedar jargon, namun akan senantiasa dibuktikan menjadi sebuah brand working ideology dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Pusat (DPP) dan Dewan Syariah Pusat (DSP). Lebih dari ambang batas afirmatif. Pun demikian bidang kepemudaan DPP PKS ‘genuine’ dipimpin oleh anak muda dengan pengalaman nasional dan internasional. Sah!

Wajah sejuk dan penuh harap kader seakan menitipkan asa serta doa bahwa PKS akan semakin besar dengan cara bermatabat dan terhormat. Tanpa harus mengjinjak, menyikut apalagi menjatuhkan. Mengawal jalannya pemerintahan dengan kritik yang substantif dan konstruktif. Oposisi menjadi sikap yang tidak berubah sejak awal.

Bisa jadi saat itu setiap dada dan hati pengurus berdegub lebih kencang, karena telah berjanji kepada Allah SWT akan ‘berlari’ serius melayani rakyat. Tentu sebuah tugas serta tanggung jawab yang tidak mudah, sarat dengan tantangan. Pantang meminta jabatan dalam dakwah, apalagi harus bersikeras mempertahankannya. Bukan hanya tabu, tapi juga aib. Namun saat didapuk untuk memegang amanah maka tak boleh surut ke belakang. Pantang berkecil hati, bernyalai ciut dan bermental rapuh. Karena bisa jadi hal itu adalah peluang meraih pahala terbaik dihadapan Allah SWT.

Tagline “Bersama Melayani Rakyat” tidak sekedar jargon, namun akan senantiasa dibuktikan menjadi sebuah brand working ideology dalam



Logo baru PKS yang baru saja diluncurkan dalam Munas PKS Ke-5 di Bandung Ahad lalu, 29 Desember 2020 (dok. pksfoto)

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Fraksi PKS DPR RI menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dalam gerak besar ini dengan berkomitmen terus berjuang untuk kepentingan keumatan, kerakyatan dan kebangsaan



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kreatif, Atraktif, Substantif



Habib Salim Ungkap 3 Cara Agar PKS Jadi Partai Islam Rahmatan Lil Alamin

KUTIPAN

Bandung (29/11) - Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufrie mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai Islam yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta).

Bandung (29/11) - Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufrie mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai Islam yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta).

"PKS partai Islam rahmatan lil alamin. Bukan sekadar tagline semata. Kader PKS Siap mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin?" ujar Habib di acara Musyawarah Nasional V PKS di Bandung, Ahad (29/11/2020).

Langkah pertama untuk menggapai partai Islam yang

rahmatan lil alamin adalah mengenal TuhanNya.

"Kita harus mengenal Rabb kita. Pencipta kita Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum fissama'. Buktikan cinta kepada Allah dengan mencintai sesama," ungkap Habib Salim.

"Kita memiliki peluang posisi yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari Presiden dan segala jabatannya. Fadzkuruni adzkurkum. Nama kita dikenal oleh penduduk langit meski tidak dikenal di bumi," imbuh dia.

Selain mengenal Allah, lanjut dia, harus mengenal

Rasulullah SAW.

Habib Salim bertanya kepada kader seberapa jauh mengenal Rasulullah SAW.

"Kedua, kita mengenal Rasulullah SAW. Saya bertanya e jauh mana pengenalan Kita terhadap Baginda Rasulullah?" tanya Habib.

Kalau membaca sirah nabawiyah tentang perang hanya 7 persen, 93 persennya berisi dari akhlaknya, kasih sayangnya. Ketika perang pun anak-anak jangan dibunuh, perempuan jangan dibunuh, tempat ibadah jangan dibunuh. Ekosistem dijaga. Rahmat bagi alam semesta.

"Tidak ada manusia yang ditulis dalam hidupnya selama 24 jam. Tidak ada," tutur dia.

Yang ketiga, kata dia, harus mengenal Islam. Tidak seperti yang disebarakan Agama yang penuh kekerasan dan peperangan. Kalau ditulis 'muslim' berarti akan mendatangkan perdamaian. Agama yang meminta kita untuk berbuat. Tidak ada dalam Islam hanya beretorika saja. Tidak ada. Kita diminta untuk beramal.

"Kader PKS harus membuktikan bahwa Islam Itu indah. Tidak ada alasan tidak mampu. Dunia sesaat, hidup kita sesaat. Jadi jadikan hidup kita manfaat!" kata dia.



Ketua Majelis Syuro PKS **Habib Salim Segaf Aljufrie** saat memberikan arahan pada acara Munas V PKS (dok. pksfoto)

Tidak seperti yang disebarakan Agama yang penuh kekerasan dan peperangan.

Kalau ditulis 'muslim' berarti akan mendatangkan perdamaian. Agama yang meminta kita untuk berbuat. Tidak ada dalam Islam hanya beretorika saja. Tidak ada. Kita diminta untuk beramal. Kader PKS harus membuktikan bahwa Islam Itu indah. Tidak ada alasan tidak mampu. Dunia sesaat, hidup kita sesaat.

Jadi jadikan hidup kita manfaat.

Ketua Fraksi PKS: Munas ke-V PKS Beri Pesan Kuat Totalitas Melayani Rakyat saat Pandemi dan Resesi Ekonomi

KUTIPAN

Bandung (27/11) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengucapkan selamat Musyawarah Nasional ke-5 Partai Keadilan Sejahtera

kepada seluruh pimpinan, fungsionaris, dan kader PKS di seluruh Indonesia. Munas PKS kali ini akan diselenggarakan pada 26-29 November di Bandung secara online dan offline dengan protokol kesehatan yang ketat.

Munas ke-5 PKS mengangkat tema "Bersama Melayani Rakyat" akan merumuskan arah kebijakan PKS selama lima tahun ke depan serta peresmian Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS masa khidmat 2020-2025. Bagi

Jazuli Juwaini tema yang diangkat pada Munas ke-5 PKS ini memberi pesan kuat kepada seluruh anggota Fraksi PKS pusat hingga daerah untuk totalitas dalam melayani rakyat.

"Sebagai ujung tombak dan garda depan perjuangan PKS, pesan Munas ke-5 PKS ditujukan utamanya kepada kami di parlemen baik pusat dan daerah agar benar-benar total dalam melayani rakyat baik secara langsung dengan membantu kesulitan rakyat maupun dengan mendengar

aspirasi mereka dan memperjuangkannya di lembaga legislatif," ungkap Jazuli.

Bahkan, menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, pesan bersama melayani rakyat ini ditujukan secara luas untuk seluruh komponen bangsa dan negara terutama yang memiliki amanah publik baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Apalagi di tengah kondisi bangsa menghadapi pandemi covid 19 dan resesi ekonomi.

"Inilah persembahan PKS untuk mengajak seluruh komponen bangsa mengedepankan pelayanan kepada rakyat di tengah kondisi bangsa yang sulit seperti sekarang. Kita butuh kebersamaan, persatuan, dan gotong royong. Singkirkan semua konflik politik dan kepentingan, mari kolchkan pelayanan kepada rakyat. Tema ini sangat relevan dan tepat momentumnya saat ini," pungkias Jazuli.

Fraksi PKS sebagai oposisi tidak akan lelah untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif kepada pemerintah agar menghadirkan pelayanan terbaik untuk rakyat, memastikan semua program dan anggaran benar benar tepat sasaran untuk membantu rakyat kehadiran negara dirasakan betul oleh rakyat.

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Sebagai ujung tombak dan garda depan perjuangan PKS, pesan Munas ke-5 PKS ditujukan utamanya kepada kami di parlemen baik pusat dan daerah agar benar-benar total dalam melayani rakyat baik secara langsung dengan membantu kesulitan rakyat maupun dengan mendengar aspirasi mereka dan memperjuangkannya di lembaga legislatif

Munas V PKS Targetkan Perolehan 15 Persen Suara

KUTIPAN

Bandung (29/11) — Munas V PKS menghasilkan satu keputusan target perolehan suara pada Pemilu 2024 adalah minimal 15 persen suara

Presiden PKS Ahmad Syaikhul optimistis bisa mewujudkan target tersebut pada tahun 2024 mendatang. Ia memaparkan alasannya mengapa bisa mencapai target tersebut.

"Kami bukan asal hitung ya. Beberapa lembaga survei menyebutkan angka yang cukup besar. Sebelumnya kita dipatok hanya 3 persen, 2,5 persen paling pol 4 persen. Tapi kalau kita lihat lembaga survei kemarin ada yang memberikan 6,8 persen," kata Syaikhul usai Munas V PKS di Bandung, Ahad (29/11).

Ia menjelaskan PKS mengadakan survei sendiri di Agustus 2020 ternyata angka yang dicapai 14,8 persen. "Itulah maknanya yang menjadi patokan untuk InshaAllah ke depan bisa ditingkatkan lebih 15 persen," ungkap dia.

Yang kedua, kata dia, kita melihat ada indikator yang dilakukan sebuah survei saat satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Itu menyatakan bahwa dari kepuasan publik kinerja pemerintahan ini, itu 58,2 persen itu tidak puas. Itulah segmentasi yang kita ambil mudah-mudahan 58,2 persen itu bisa menjadi captive market PKS.

"Harapan ya seperti itu. Sehingga obsesi mudah-mudahan ke depan ceruk-ceruk ini bisa kita ambil. Termasuk di dalamnya adalah ceruk milenial," kata dia.

"Itulah saya kenapa menempatkan dr Gamal Albinsaid sebagai Kabid Kepemudaan. Karena beliau secara berprestasi di dalam dan di luar negeri," kata dia menegaskan.



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

Dok: PKSFoto

Kami bukan asal hitung ya. Beberapa lembaga survei menyebutkan angka yang cukup besar. Sebelumnya kita dipatok hanya 3 persen, 2,5 persen paling pol 4 persen. Tapi kalau kita lihat lembaga survei kemarin ada yang memberikan 6,8 persen

PKS Luncurkan Lambang Baru, Ini Makna dan Filosofinya

KUTIPAN

Bandung (29/11) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan lambang, mars dan hymne baru dalam gelaran Munas V PKS di Bandung, Ahad (29/11/2020

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, peluncuran lambang, mars dan hymne sebagai semangat baru PKS dalam perjalanan berbangsa dan bernegara.

"Lambang, mars dan hymne baru PKS sudah direncanakan pada kepengurusan sebelumnya. Ini adalah semangat baru PKS, komitmen PKS dekat dan hangat dengan semua kalangan tanpa kecuali," ujar Habib Aboe Bakar dalam Munas V PKS di Bandung.

Anggota Komisi III DPR RI ini menyebutkan, bentuk bulat yang ada dalam lambang PKS menggambarkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bumi Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

"Bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam untuk menajaga

keseimbangan, kesinambungan sejarah, kejayaan dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap Habib Aboe.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini mengungkapkan, simbol untaian 17 butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

"Warna oranye adalah warna baru. Melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan yang selalu optimistis dan semangat muda," ujar dia.

Habib Aboe menambahkan, warna putih melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas dan mulia. Sementara warna hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif dan perlindungan.



Sekjen DPP PKS Habib Aboebakar Alhabsy dan gambar logo baru PKS (Foto: PKSFoto)

Lambang, mars dan hymne baru PKS sudah direncanakan pada kepengurusan sebelumnya. Ini adalah semangat baru PKS, komitmen PKS dekat dan hangat dengan semua kalangan tanpa kecuali.

ARTI DAN MAKNA LAMBAH BARU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



 Bentuk bulat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bumi Indonesia yang berlandaskan Pancasila;

 Dua bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam untuk menjaga keseimbangan, kesinambungan sejarah, kejayaan, dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;

 Untaian 17 (tujuhbelas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan;

 Putih melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas, dan mulia;

 Warna oranye melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan yang selalu optimis, dan semangat muda;

 Hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif, dan perlindungan;

PKS PKS dengan warna hitam, singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera.

MSI: 3 Point Utama Isi Hymne Baru PKS yaitu Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan

KUTIPAN

Bandung (29/11) --- Munas V PKS juga meresmikan logo yang dimodifikasi dan hymne serta Mars PKS terbaru.

Muhammad Shohibul Iman, Sang Penulis lirik menyampaikan Lirik hymne ini terinspirasi dari visi PKS yaitu partai Islam tetap sering dibenturkan anti kebangsaan/nasionalis.

"Pada masa kepemimpinan saya, saya menginginkan PKS itu adalah partai islam yang kompatibel dengan Indonesia masa kini dan partai yang sangat concern dengan nilai-nilai kemanusiaan," ungkap Presiden PKS ke-6 ini.

Oleh karena itu, lanjut MSI, pihaknya dan Dwiki Dharmawan, akhirnya merumuskan lirik dan aransemen hymne baru PKS.

"Alhamdulillah tidak membutuhkan waktu yang lama sekitar 4 bulan kami menyelesaikannya," terang Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

"Dan semoga hymne dan mars ini bisa menambah semangat pergerakan bagi kader-kader PKS dimanapun mereka berada," tutup Shohibul Iman.



Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga penulis Lirik Hymne PKS **Mohamad Shohibul Iman**
(Foto : Daru/pksfoto)

Pada masa kepemimpinan saya, saya menginginkan PKS itu adalah partai islam yang kompatibel dengan Indonesia masa kini dan partai yang sangat concern dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu saya dan Kang Dwiki Dharmawan, akhirnya merumuskan lirik dan aransemen hymne baru PKS

Dilantik Menjadi Ketua DPP PKS Bidang
Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Sampaikan Platform PKS Tentang Ekonomi Berkeadilan

KUTIPAN

Jakarta (30/11) – Politisi PKS, Anis Byarwati menyampaikan sejumlah rencana dan misi yang akan dilakukannya di Bidang Ekonomi dan Keuangan setelah secara resmi dilantik menjadi Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Periode 2020-25.

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, MA, pada acara Musyawarah Nasional V PKS yang dilaksanakan di Mason Hotel, Bandung Barat, Jawa Barat (29/11/2020).

"PKS sejatinya sudah memiliki pijakan yang kuat dengan posisinya sebagai partai oposisi. PKS sudah memiliki Platform Kebijakan PKS. Platform ini merupakan dokumen yang merefleksikan visi, misi, program dan sikap partai terhadap persoalan kebangsaan," kata Anis.

Platform Kebijakan PKS menjadi inspirasi dan motivasi

utama dalam perumusan sikap dan kebijakan partai. Demikian juga di Bidang Ekonomi dan Keuangan, platform menjadi filosofi dasar semua kebijakan maupun program yang akan dirumuskan dan menjadi acuan dalam menentukan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Setiap analisis kebijakan yang dilakukan Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP akan selalu merefleksikan ide dan gagasan yang terdapat dalam platform PKS ini secara kuat," kata Anis.

PKS mencita-citakan institusi ekonomi berkeadilan. Yaitu ekonomi yang inklusif, bersifat egaliter, memberikan

hak yang sama terhadap seluruh elemen masyarakat, ekonomi yang tidak elitis, tidak monolitik, tidak oligarkis.

"Ini adalah perekonomian yang dilandasi persaingan usaha yang sehat dan setara bagi seluruh pelaku usaha. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas," jelas Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menegaskan, bahwa ekonomi berkeadilan yang tercantum dalam platform, mendorong tumbuhnya ekonomi yang berbasis knowledge yang menumbuhkan competitive advantage (keunggulan kompetitif) berdasarkan kelimpahan sumber daya alam yang tersedia.

"Bukan sekedar ekonomi berbasis sumber daya alam, karenanya ekonomi berkeadilan ini mensyaratkan tumbuhnya SDM unggul yang memiliki nilai tambah dan daya saing dari berbagai produk ekonomi nasional kita. Semua itu terbingkai dalam sistem inovasi nasional. Tugas utama dari



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan

PKS sejatinya sudah memiliki pijakan yang kuat dengan posisinya sebagai partai oposisi. PKS sudah memiliki Platform Kebijakan PKS. Platform ini merupakan dokumen yang merefleksikan visi, misi, program dan sikap partai terhadap persoalan kebangsaan,

Bidang Ekonomi dan Keuangan, mewujudkan apa yang dicita-citakan PKS dalam platform tersebut," tambah Anis.

Doktor ekonomi Islam ini juga menekankan bahwa program Bidang Ekonomi dan Keuangan periode 2020-2025 yang dipimpinnya, dipastikan akan meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Bidang Ekonomi dan Keuangan diperiode-periode sebelumnya.

"Kesinambungan program harus dijaga, agar semakin mempertahankan posisi PKS sebagai partai oposisi," tegas Anis.

Anis menambahkan bahwa, yang terpenting saat ini adalah PKS harus memberikan alternatif pemikiran-pemikiran ekonomi yang tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Hadiri Munas V PKS, Netty: Logo Baru PKS Akan Memikat Pemilih Perempuan dan Milenial

KUTIPAN

Bandung (30/11) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V pada 26-29 November 2020 di Bandung, Jawa Barat.

PKS melakukan terobosan dengan mengganti logo partai menjadi berbentuk lingkaran dengan dominasi warna oranye dengan elemen dua bulan sabit mengapit satu tangkai padi tegak lurus berwarna putih serta tulisan PKS berwarna hitam.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani yang hadir dalam acara Munas mengatakan Logo baru PKS mencerminkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat

berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

"Warna oranye melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan yang selalu optimis dan semangat muda. Logo ini diharapkan lebih memikat rakyat, khususnya perempuan dan milenial untuk memilih PKS," katanya dalam keterangan media, Senin, (30/11).

Menurut Netty yang pada pengurusan periode 2020 - 2025 ini didapuk sebagai Ketua DPP PKS Bidang Kesra,

Partainya akan berkomitmen untuk mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang dimulai dengan menghadirkan kepemimpinan di daerah.

"PKS akan istiqomah mendorong lahirnya kepemimpinan di daerah yang menjadi cikal bakal kepemimpinan di tingkat nasional. PKS juga memberi kesempatan luas kepada para pemuda dan kader perempuan untuk berkontribusi positif memperbaiki bangsa dan negara di berbagai bidang" tambahnya.

Dalam perannya sebagai salah satu Ketua DPP PKS, Netty berkomitmen untuk membangun sinergi dan berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, maju dan sejahtera.

"Saat ini keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat masih belum merata. Jurang antara yang kaya dan yang miskin masih lebar. PKS harus bersinergi dan berkolaborasi dengan elemen bangsa lain guna menyejahterakan rakyat. Mohon doa agar saya dapat memikul amanah ini dengan baik," kata Netty mengakhiri.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

PKS akan istiqomah mendorong lahirnya kepemimpinan di daerah yang menjadi cikal bakal kepemimpinan di tingkat nasional. PKS juga memberi kesempatan luas kepada para pemuda dan kader perempuan untuk berkontribusi positif memperbaiki bangsa dan negara di berbagai bidang

Di Munas V PKS, Johan Sebut Pertanian dan Kelautan sebagai Falsafah Perjuangan Dasar PKS

KUTIPAN

Bandung (30/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menjadi salah satu peserta yang menghadiri acara Munas kelima PKS yang diselenggarakan di Bandung (26-29/11/2020) yang berisi berbagai kegiatan penting untuk mengokohkan falsafah perjuangan dasar PKS ke depan.

Melalui kegiatan munas tersebut, Johan menyebutkan bahwa PKS sebagai entitas politik nasional telah meletakkan sektor Pertanian dan kelautan sebagai salah satu dari 12 falsafah perjuangan dasar PKS.

"Ini menunjukkan perhatian dan cita-cita PKS untuk memajukan sector Pertanian dan kelautan sebagai perjuangan dasar PKS", tutur Johan.

Dalam Momentum acara Munas kelima PKS tersebut, Johan dikukuhkan dan dilantik sebagai salah satu pengurus DPP PKS, yakni sebagai Ketua Bidang Pengembangan Wilayah Dakwah di Bali, NTB dan NTT (Bali Nusra).

"Melalui momentum munas ini, PKS ingin menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia, termasuk memperkuat kebersamaan melayani rakyat dan menjadikan sector Pertanian dan Kelautan serta juga memasukkan Bidang Agraria, kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai bagian penting dari perjuangan dasar PKS", papar Johan.

Anggota Komisi IV DPR RI ini menyatakan bahwa PKS berkeyakinan bahwa potensi negara kita sebagai zamrud khatulistiwa dan sebagai benua maritim memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia

sehingga tata Kelola Pertanian, kelautan, kehutanan dan lingkungan hidup harus menjadi sumber peningkatan daya saing dan keunggulan bangsa kita dibanding dengan bangsa lainnya.

"Saya melihat arah pembangunan Indonesia ke depan harus bertumpu pada keunggulan daya saingnya terutama keunggulan sebagai negara agraris dan negara maritim," ujar Johan.

Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa PKS berpandangan bahwa negara kita secara demografis dan geografis telah memperlihatkan fakta empiris kekayaan alam dan pluralitas budaya yang luar biasa dan hal ini bisa kita lihat dari berlimpahnya kekayaan alam di darat dan di laut serta keanekaragaman biodiversitas yang sangat mengagumkan.

"Dengan pandangan ini, PKS ingin memperteguh diri sebagai partai yang terdepan dalam memberikan pelayanan kepada rakyat," urai Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini menjelaskan bahwa sebagai bentuk keseriusan



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

Saya melihat arah pembangunan Indonesia ke depan harus bertumpu pada keunggulan daya saingnya terutama keunggulan sebagai negara agraris dan negara maritim

untuk memberikan pelayanan terbaik kepada petani dan nelayan.

"PKS memiliki bidang pengurusan yang khusus menangani Bidang Tani dan Nelayan untuk menegaskan keberpihakan PKS kepada semua petani dan nelayan di seluruh nusantara ini," tutur Johan.

Legislator dari Pulau Sumbawa ini berharap Sektor

Pertanian dan Kelautan bisa lebih maju dengan perjuangan Bersama-sama dengan entitas politik lainnya.

"Kita harus bergandengan tangan dan bekerja keras memperjuangkan Indonesia yang lebih maju dengan menegakkan keadilan dan membangun kesejahteraan terutama masyarakat petani dan nelayan di negeri ini," tutup Johan.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



“ Fraksi PKS DPR RI berkomitmen terus berjuang untuk kepentingan Keumatan, Kerakyatan dan Kebangsaan. ”

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Anggota FPKS minta Pemerintah **batalan** **Calling Visa Untuk Israel**

KUTIPAN

Jakarta (30/11) — Pemerintah RI tetap bersikukuh untuk menerbitkan Calling Visa bagi Israel melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan akan memperketat prosesnya.

Melihat kebijakan itu Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyahi menegakkan agar Pemerintah membuat peraturan harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan meminta kebijakan itu untuk dibatalkan.

"Pemerintah jelas keliru ketika calling visa untuk Israel diberikan, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Paragraf pertama jelas dan tegas menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, Palestina masih diduduki Israel, itu jelas penjajahan" tegas Kharis dalam keterangan Pers kepada Media Senin (30/11).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyayangkan langkah Kemenkumham yang bertolak belakang dengan Kemenlu RI.

"Saya masih ingat dan selalu ingat perkataan Ibu Menlu 'Kita selalu dekat di hati, di setiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, isu Palestina, is always there,' sikap Menlu sudah bagus namun begitu Menkumham didalam mengambil langkah terbitkan calling visa seperti menampar muka sendiri" jelas Kharis.

Perlu diketahui Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan layanan visa elektronik bagi orang asing subyek Calling Visa sejak tahun 2012.

Pemerintah telah menetapkan delapan negara calling visa, yaitu Afghanistan,

Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria dan Somalia.

Menurut legislator Solo ini dalam politik luar negerinya, negara Israel itu negara penjajah yang telah teramat banyak melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan yang menyebabkan rakyat Palestina kehilangan tanah airnya dan kehilangan kedaulatannya sebagai individu, sebagai warga negara, dan sebagai bangsa.

"Sebagai salah satu wakil rakyat Indonesia yang grandung akan keadilan dan kemanusiaan saya minta agar Pemerintah membatalkan pemberian calling visa kepada Israel" tutup Kharis.



Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

"Pemerintah jelas keliru ketika calling visa untuk Israel diberikan, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Paragraf pertama jelas dan tegas menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, Palestina masih diduduki Israel, itu jelas penjajahan"

Pelanggaran HAM pada Etnis Rohingya Terus Terjadi Meski Myanmar Digugat

Dengan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia harus terus mendesak agar Myanmar, dengan bantuan negara ASEAN, dapat menyelesaikan akar permasalahan dengan tujuan agar pemulangan warga Rohingya di kamp-kamp tersebut dapat dilakukan secara sukarela, aman, dan bermanfaat.

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (25/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat merespon pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Myanmar terhadap masyarakat Etnis Rohingya.

Menurut Toriq, apa yang dilakukan Myanmar terhadap Etnis Rohingya benar-benar melanggar Pembukaan UUD 1945.

“Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh

sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”, ungkap Toriq Hidayat.

Atas Prinsip ini, Anggota komisi I asal PKS menjelaskan bahwa Indonesia berkewajiban untuk mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa dan menolak penjajahan dalam segala bentuk, seperti yang dialami oleh warga Palestina dan etnis Rohingya.

Hal ini disampaikan

kepada Peserta Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar pada 17 November kemarin di Kota Tasikmalaya.

“Bayangkan dalam kasus pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya, Pemerintah Myanmar tidak berhenti melakukan genosida atau membersihkan etnis Rohingya meski negara itu sudah digugat di Mahkamah Internasional (ICJ)”, ungkap Aleg PKS ini.

Tambahnya lagi, argumen yang disampaikan oleh Pemimpin Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada Mahkamah Internasional mereka membantah melakukan genosida dan beralasan operasi militer itu untuk menumpas kelompok Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) yang menyerang pos polisi dan tentara.

“Myanmar merupakan rumah bagi etnis Rohingya, yang sejak 2017 terpaksa menyelamatkan diri dari Rakhine State untuk menghindari kekerasan oleh militer negara itu. Kini diperkirakan lebih dari satu juta



warga Rohingya mendiami kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia”, jelas Toriq.

Dia menilai, dengan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia harus terus mendesak agar Myanmar, dengan bantuan negara ASEAN, dapat menyelesaikan akar permasalahan dengan tujuan agar pemulangan warga Rohingya di kamp-kamp tersebut dapat dilakukan secara sukarela, aman, dan bermanfaat

“Selain menekankan perlindungan bagi warga Rohingya, Indonesia juga harus

menguatkan kerja sama ASEAN untuk melawan kejahatan lintas batas termasuk penyelundupan manusia, karena diduga warga Rohingya juga menjadi korban dari kejahatan lintas batas” harap Toriq.

Toriq bersyukur atas kepedulian Kerajaan Saudi yang berpartisipasi dalam konferensi PBB untuk donor bagi pengungsi Rohingya pada oktober lalu.

Saudi telah menampung sekitar 270.000 pengungsi Rohingya, dan memberi mereka layanan kesehatan dan pendidikan gratis, serta peluang kerja.

Normalisasi Hubungan dengan Israel Bentuk Penghianatan Terhadap UUD 1945

Kami PKS mengingatkan kepada semua pihak khususnya pemerintah untuk tidak membuat kerjasama dengan Israel yang notabene merupakan negara penjajah bagi Palestina. Kita harus ingat bahwa Palestina merupakan negara yang paling awal mendukung kemerdekaan Indonesia, maka sudah seharusnya Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (25/11) — Fraksi PKS DPR RI melalui pernyataan Wakil Ketua Fraksi, Sukamta, menyebut bahwa normalisasi dan segala bentuk hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Israel merupakan penghianatan terhadap UUD 1945.

"Cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas menyebut bahwa Indonesia melawan segala bentuk penjajahan. Kami PKS

mengingatkan kepada semua pihak khususnya pemerintah untuk tidak membuat kerjasama dengan Israel yang notabene merupakan negara penjajah bagi Palestina. Kita harus ingat bahwa Palestina merupakan negara yang paling awal mendukung kemerdekaan Indonesia, maka sudah seharusnya Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina" pesan Anggota Komisi I DPR RI ini.

Isu mengenai normalisasi hubungan dengan Israel mencuat setelah Pemerintah

melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuka layanan calling visa untuk delapan negara yakni Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia.

Menurut Sukamta, ada kegagalan dalam pengaktifan kembali calling visa di masa pandemi Covid-19 ini.

"Jelas kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel maka aneh ketika mendadak calling visa diaktifkan kembali di masa pandemi. Jangan-jangan, ada motif ekonomi dan politik yang melatarbelakanginya," tandas Sukamta.

Ketua Bidang BPPLN DPP PKS ini juga menyatakan bahwa politik bebas aktif merupakan karakter Indonesia sebagai bangsa yang besar.

"Di tengah ketidakpastian global efek dari pandemi Covid-19, pemilu Presiden Amerika Serikat serta hubungan antara AS dan China langkah-langkah Indonesia harus taktis strategis berorientasi jangka panjang bukan pragmatis. Politik bebas aktif, berdiri diatas kepentingan semua negara bukan memihak



salah satu blok demi perdamaian dunia harus terus dijaga Indonesia," terang Sukamta.

Sebagai informasi, saat ini Sudan, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Dampaknya justru membuat Israel semakin ganas menghancurkan pemukiman

Palestina dan membangun pemukiman Yahudi.

Bahkan PM Israel Benjamin Netanyahu berjanji tidak akan mengentikan upaya mengambil alih tanah-tanah Palestina. Normalisasi ini langkah keliru, mestinya Israel diisolasi supaya jera.

Kebijakan Calling Visa untuk Warga Negara Israel **Harus Dibatalkan**



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Indonesia bahkan perlu memaksimalkan usaha itu baik dalam posisinya sebagai Anggota tidak tetap di DK PBB, maupun sebagai anggota Dewan HAM, dan tidak malah membuka celah sebaliknya, dengan izinkan calling visa Israel

HIDAYAT NURWAHID

Wakil Ketua MPR RI



Fasilitas calling visa untuk Warga Negara Israel harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia

SURAHMAN HIDAYAT

Anggota BKSAP DPR RI



“Pemerintah jelas keliru ketika calling visa untuk Israel diberikan, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Paragraf pertama jelas dan tegas menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa

ABDUL KHARIS

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



“Jelas kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel maka aneh ketika mendadak calling visa diaktifkan kembali di masa pandemi. Jangan-jangan, ada motif ekonomi dan politik yang melatarbelakanginya

SUKAMTA

Anggota Komisi I DPR RI

Andi Akmal Minta Bulog Kembali Menjadi Lembaga Pengendali Pangan Yang Mumpuni

KUTIPAN

Jakarta (01/12) --- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin ketika mendengar Kementerian BUMN berencana membentuk Holding BUMN Pangan dengan suntikan anggaran 1 Triliun rupiah berupa PMN.

Akmal meminta kepada Pemerintah melalui komisi IV DPR agar Bulog kembali pada regulasi awal tanpa berlabel korporasi yang mencari untung.

Akmal mengatakan, tiga pilar Utama Bulog ini menjadi rancu ketika membonceng label perusahaan.

"Yang dimaksud tiga pilar utama itu adalah Ketahanan pangan melalui persediaan yang cukup, Akses dan harga beras yang terjangkau oleh masyarakat dan Melakukan stabilisasi harga," ungkapnya.

"Selama ini fungsi BULOG menjadi tersandra akibat tuntutan mencari keuntungan. Ujung rakyat yang mendapat kesusahan, terutama para petani. Dilema Bulog terjadi akibat regulasi yang berubah semenjak 20 Januari 2003", tutur Akmal.

LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) BULOG berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan

Umum BULOG dan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 2003 pasal 70 dan 71.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini melihat, ketika Calon Perusahaan Holding BUMN Pangan yang akan membangun banyak warehouse, cold storage dan pabrik es untuk perbaiki fasilitas logistik, menjadi jalan kembalinya Bulog sebagai lembaga yang sesuai harapan yakni menjadi tangan pemerintah penstabil pangan di masyarakat.

Bisa saja Bulog bekerjasama dengan Holding pangan saling sinergi, tapi kekuasaannya tidaklah dibawah Kementerian BUMN, tapi lembaga yang langsung di bawah presiden.

"Jadi Bulog akan menjadi lembaga yang cukup kuat dan mumpuni menangani berbagai persoalan pangan di lapangan terutama persoalan ketersediaan dan distribusi", kata Akmal.

Politisi PKS ini menjelaskan, hingga saat ini negara ini masih mimpi-mimpi saja terkait swasembada pangan. Amanat UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan untuk mencapai kedaulatan pangan dan kemandirian pangan belum juga terealisasi hanya sekedar tulisan di atas kertas.

Persoalan sangat mendasar aturan atau regulasi tidak paten, berubah sana-sini bahkan semakin buruk ketika dihadapkan dengan UU Cipta Kerja.

"Saya berharap, BULOG di hilirnya berfungsi sesuai tujuan



Dr. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP.,MM

Anggota Komisi IV DPR RI

Saya berharap, BULOG di hilirnya berfungsi sesuai tujuan utamanya. Yakni menjaga ketahanan pangan. Bagaimana harus menyediakan beras dalam jumlah yang cukup, Akses dan harga yang terjangkau dan Harganya stabil sepanjang tahun dapat terealisasi kedepannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya

utamanya. Yakni menjaga ketahanan pangan. Bagaimana harus menyediakan beras dalam jumlah yang cukup, Akses dan harga yang terjangkau dan

Harganya stabil sepanjang tahun dapat terealisasi kedepannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Penangkapan Menteri KKP

Aleg PKS: Sudah Diingatkan agar Tak “Serampangan” terkait Impor Benur Lobster

Kontroversi ekspor benih Lobster seharusnya membuat Menteri KKP untuk dapat berperan sebagai regulator yang baik dan memperkuat pengawasan terhadap berbagai perilaku penyimpangan dan permainan yang hanya mengedepankan profit semata

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (25/11) -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, memberikan tanggapan terhadap pemberitaan terkait adanya penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo yang berhubungan dengan persoalan ekspor benih lobster.

Johan mengungkapkan bahwa sebagai mitra dari Komisi IV DPR RI, pihaknya sudah mengingatkan Pemerintah agar tidak “serampangan” membuat keputusan membuka Kembali

izin ekspor benur lobster yang sebelumnya secara tegas telah dilarang melalui Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (KP) No. 1 Tahun 2015 dan adanya PermenKP No. 56 tahun 2016 yang berisi larangan penangkapan dan atau pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan.

“Kontroversi ekspor benih Lobster seharusnya membuat Menteri KKP untuk dapat berperan sebagai regulator yang

baik dan memperkuat pengawasan terhadap berbagai perilaku penyimpangan dan permainan yang hanya mengedepankan profit semata”, tutur Johan.

Politikus PKS ini menyampaikan bahwa praktik penjualan atau ekspor benih lobster, kepiting dan rajungan memang berpotensi akan menimbulkan indikasi kerugian negara dan akan lebih menguntungkan negara lain, seperti Vietnam.

“Di sisi lain, ekspor benih lobster telah mengancam populasi lobster di Indonesia sehingga kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan lobster harus menjadi prioritas pemerintah”, ujar Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini sebenarnya lebih berharap agar Pemerintah lebih serius mengembangkan usaha pembesaran (Sea Ranching) untuk ketiga komoditas yakni lobster, kepiting dan rajungan sehingga benih yang ditangkap



oleh nelayan dapat terserap oleh kegiatan pembesaran dalam negeri sebelum diekspor keluar.

“Hal ini akan jauh lebih menguntungkan perekonomian nasional karena komoditas tersebut merupakan bagian dari komoditas perikanan ekonomis penting yang mesti dikelola secara cermat dan inovatif,” papar Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menilai seharusnya KKP lebih berhati-hati terhadap izin ekspor benur lobster ini, karena sebelumnya telah beredar investigasi dari berbagai media terkait permainan ekspor benih lobster tersebut.

Dari informasi yang beredar, terdapat beberapa perusahaan yang sudah melakukan ekspor meskipun baru mengantongi izin kurang dari dua bulan setelah izin diberikan, dan hal ini jelas merupakan pelanggaran administrasi karena bertentangan dengan PermenKP No. 12/2020.

“Atas kejadian ini, kita berharap bisa menjadi pembelajaran dan evaluasi total dalam pengelolaan lobster supaya komoditas ini dikelola dengan tata niaga perikanan yang berorientasi pada pemberdayaan nelayan demi memperbaiki kesejahteraan nelayan kita”, tutup Johan.

Anggota FPKS Setuju dan Dukung Pembentukan Pansus Semerawutnya Dana Sawit

“Selama ini tidak jelas dana sawit yang besar ini untuk kebun rakyat atau untuk korporasi. Bahkan dana besar akibat pungutan dari perusahaan besar sawit ini anehnya masih juga dapat PMN (menyertaan Modal Negara)”

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (25/11) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Slamet mendukung dibentuknya pansus dana sawit. Palsanya banyak sekali kejanggalan mulai dari proses pembentukannya hingga tata kelolanya sehingga tujuan awal pembentukan dana sawit ini tidak berdampak yakni kemajuan sawit Indonesia untuk keburuan rakyat sekaligus peningkatan kesejahteraan petani sawit.

Salah satu kejanggalan dari badan pengelola dana sawit ini menurut Slamet adalah, Pembentukan BPDPKS merujuk pada UU No. 39 Tahun

2014 tentang Perkebunan, tapi pembentukannya dari kementerian keuangan melalui BLU (Badan Layanan Umum) sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) bermitra dengan Komisi XI DPR, bukan Komisi IV.

“Semangat awal pembentukan BPDPKS ini sangat bagus, dan semua beresepak karena ada harapan perbaikan tata kelola kelapa sawit nasional yang merupakan raja dunia. Sektor Kelapa sawit ini pun telah menyumbang devisa cukup tinggi bagi Indonesia. Semestinya minimal

ada perbaikan besar di sektor perkelasawitan ini dan yang lebih utama, ada peningkatan kualitas lingkungan yang konstan sekaligus peningkatan kesejahteraan petani sawitnya”, tutur Slamet.

Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi IV ini menerangkan, Dana yang dikelola BPDPKS sangat besar. Per Desember 2019, ada dana senilai Rp 47 triliun yang dikelola.

“Dana ini bersumber dari potongan biaya ekspor Crude Palm Oil (CPO). Petani yang mestinya merasakan dampaknya, namun di beberapa kabupaten ditemukan para petani melakukan peremajaan dengan dana mandiri tanpa sentuhan BPDPKS. Ini sangat Ironi”, keluh Slamet.

Begitu juga persolan lingkungan, tambahannya. Kebakaran lahan akibat perkebunan sawit atau di areal perkebunan sawit, kelestarian satwanya, pengelolaan yang berkelanjutanya semestinya dapat didorong penyelesaiannya



dengan ketersediaan dana yang ada dan sangat besar nilainya.

“Transparansi jumlah dan ketepatan penggunaan mestinya di publikasi secara transparan, sehingga kecurigaan-kecurigaan selama ini yang beredar dapat di jawab dengan profesional. Selama ini tidak jelas dana sawit yang besar ini untuk kebun rakyat atau untuk korporasi. Bahkan dana besar akibat pungutan dari perusahaan besar sawit ini anehnya masih juga dapat PMN (menyertaan Modal Negara)”, Kritik Slamet.

Legislator asal sukabumi ini menekankan pembentukan pansus ini bukan untuk menjatuhkan salah satu pihak,

tapi lebih pada tujuan mengurai masalah sehingga meluruskan tujuan awal dibentuknya lembaga pengelola dana sawit ini.

“Adanya diserifikasi produk sawit yang berkualitas yang terindikasi pada pembukaan lapangan kerja, kelestarian lingkungan dengan kualitas tanah, air dan udara yang terjaga, kebakaran hutan yang ditekan sekecil-kecilnya dengan pencegahan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang hidup dari sawit mesti menjadi konsen utama pada pengelola dana sawit,” papar Slamet.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

5 Must Know Fact About WHITE



Buchori

Anggota Komisi VIII FPKS DPR RI



Netty Prasetyani

Anggota Komisi IX FPKS DPR RI



Anis Byarwati

Anggota Komisi XI FPKS DPR RI



Kurniasih Mufidayanti

Anggota Komisi IX FPKS DPR RI



Syahrul Aidi Maizat

Anggota Komisi VIII FPKS DPR RI



Clean



Pure



Sincere



Genuine



Majestic

Information : PKS logo consists of three primary colors, white, black and orange. White symbolizes clean, pure, sincere, genuin and majestic

Anggota FPKS Ingatkan Pemerintah Terkait Risiko Fiskal Jangka Panjang

Sampai saat ini pemerintah masih saja mempertahankan proyek-proyek ambisius yang sejatinya bisa ditunda hingga kondisi keuangan negara lebih baik

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (24/11) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak memperingatkan Pemerintah terkait risiko fiskal jangka panjang karena kebijakan belanja dan pendapatan negara yang diambil.

Jangan sampai pemerintah gagal mempertahankan stabilitas fiskal yang bisa menyebabkan ketidakmampuan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan Amin menanggapi pertanyaan jurnalis terkait kian membesarnya jumlah utang Pemerintah pada kuartal III tahun 2020 ini.

"Sampai saat ini pemerin-

tah masih saja mempertahankan proyek-proyek ambisius yang sejatinya bisa ditunda hingga kondisi keuangan negara lebih baik," terang Amin.

Amin menyontohkan proyek tol trans Sumatera tahap I yang membutuhkan tambahan dana sebesar Rp80 triliun yang diusulkan diambil dari dana APBN melalui penyertaan modal negara (PMN). PT Hutama Karya yang bertanggungjawab pada pembangunan tol Trans Sumatera meminta pemerintah mengucurkan PMN secara bertahap hingga 2023 mendatang. Perinciannya Rp 15 triliun di 2021, sebesar Rp 30 triliun di 2022 dan Rp 35 triliun di 2023.

"Infrastruktur penting, namun karena kondisi keuangan negara yang sedang berat dan utang yang makin menumpuk, proyek ini bisa ditunda karena untuk saat ini bukan prioritas," tegas Amin.

Lebih lanjut Amin menegaskan, Pemerintah semestinya memiliki rasa prihatin terhadap krisis saat ini karena pandemi Covid-19 belum berakhir ditambah ekonomi saat ini masuk ke jurang resesi.

Amin menilai, Pemerintah juga kurang berani menyisir dan memotong anggaran belanja masing-masing kementerian yang mestinya bisa ditunda demi penghematan.

"Kecuali belanja Pemerintah yang bertujuan menstimulus konsumsi publik dan menggerakkan ekonomi nasional, serta penguatan ketahanan pangan dan energi," katanya.

Sebagaimana disebutkan Kementerian Keuangan, utang pemerintah per September 2020 mencapai Rp 5.756,87



triliun, melesat lebih dari Rp 1.000 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu. Rasio utang terhadap produk domestik bruto pun meningkat dari 30,5% pada tahun 2019 menjadi 38,5% terhadap PDB pada 2020.

Dalam dua pekan terakhir, pemerintah kembali menambah utang lewat mekanisme pinjaman bilateral masing-masing Rp 9,1 triliun dari Jerman, Rp 15,4 triliun dari Australia, dan Rp 6,9 triliun dari Jepang.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, jumlah tersebut masih kurang dibanding angka defisit APBN yang melonjak menjadi Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34% terhadap PDB

yang sebelumnya ditargetkan di level 1,76% atau setara Rp 307,2 triliun. Defisit melebar karena kebutuhan belanja negara yang meningkat menjadi Rp 2.739,16 triliun.

Pemerintah sendiri memproyeksi rasio utang terhadap PDB berpotensi mencapai lebih dari 40% pada tahun depan seiring defisit anggaran yang masih lebar akibat Pandemi Covid-19. Terkait posisi utang luar negeri, Bank Indonesia beberapa hari lalu menyebut terjadi peningkatan sebagian rasio risiko.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Nevi Zuairina: PT RNI Harus Punya Roadmap Jelas Sebelum Jadi Holding BUMN Pangan

KUTIPAN

Subang (01/11) --- Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, meminta perbaikan dari sisi korporasi calon Holding BUMN cluster Pangan

Karena BUMN ini, menurut Nevi, akan memimpin seluruh perusahaan Negara yang bergerak di bidang pangan.

Calon Perusahaan Holding BUMN Pangan yang Anggota DPR dari FPKS ini adalah PT. RNI (Rajawali Nusantara Indonesia).

Oleh Kementerian BUMN, lanjut Nevi, perusahaan ini digadang-gadang akan menjadi holding perusahaan pangan dengan perencanaan mendapat suntikan PMN sebesar Rp1 triliun di tahun 2021, yang akan digunakan untuk program sawah, pangan lalu perikanan akan kita bangun banyak

warehouse, cold storage dan pabrik es untuk perbaikan fasilitas logistik.

"Saya melihat, bila perusahaan Holding ini terealisasi, akan menjadi trobosan besar untuk memecah persoalan pangan yang hingga saat ini banyak terkendala berkaitan persoalan data, persoalan produksi, distribusi dan transit antar daerah", ucap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini, sangat menekankan bahwa efektifitas anggaran negara yang akan di gelontorkan ini sangat besar. Banyak masyarakat berharap, kekuatan alam negara kita ini dapat

dikelola sehingga terbebas dari jeratan impor Pangan. Ini semua bisa di realisasikan dengan kolaborasi Pemerintah dan para petani kita di seluruh Indonesia saling bermitra dan bekerjasama untuk mewujudkannya.

Persoalan pengelolaan anggaran oleh anggota DPR RI ini pertanyakan karena, Pada awal November 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 di depan DPR.

Hasi IHPS I Tahun 2020 dari BPK menyimpulkan bahwa efektifitas PT RNI dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Tahun 2017 sampai dengan semester I Tahun 2019 kurang efektif.

"RNI harus membuktikan menampilkan roadmap jelas kepada publik akan kemana Holding pangan ini di bawa dan apa yang akan dihasilkan. Begitu pula berkaitan dengan pengelolaan anggaran harus mampu diperbaiki dari tahun sebelum-sebelumnya sehingga menjadi perusahaan yang efektif, efisien dan kontributif pada negara serta rakyat Indonesia", Kata Nevi.

Nevi juga mempertanyakan peran bulog yang saat ini sangat strategis ketika ada BUMN pangan.

Nevi menyampaikan agar peran bulog kembali ke asal yakni sebagai badan penyangga pangan yang khusus dan fokus



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

Saya melihat, bila perusahaan Holding ini terealisasi, akan menjadi trobosan besar untuk memecah persoalan pangan yang hingga saat ini banyak terkendala berkaitan persoalan data, persoalan produksi, distribusi dan transit antar daerah

membakup persoalan ketersediaan pangan.

Bulog, katanya, menjadi tangan pemerintah sebagai penyangga pangan, bukan sebagai perusahaan yang cari untung. Karena sebagai perusahaan yang mencari untung, akan diwakili oleh holding pangan.

"Saya berharap, Holding

BUMN pangan ini dapat segera terealisasi dalam kondisi dan keadaan ideal baik secara visi, misi dan implementasi. Banyak mata melihat dan berharap, untuk kali ini, jangan sampai rencana ini berantakan. Efektifitas pengelolaan anggaran menjadi kunci sukses realisasi pembentukan BUMN pangan ini", tutup Nevi Zuairina.

Legislator PKS: Pemerintah Harus Geser Pusat Gravitasi Pembangunan Inovasi

KUTIPAN

Jakarta (30/11) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pemerintah aktif mendorong kalangan swasta dalam hal pengembangan Iptek dan inovasi nasional.

Upaya tersebut, lanjut Mulyanto, tidak bisa hanya mengandalkan peran Pemerintah seperti yang terjadi hingga hari ini.

Menurut Mulyanto, jika Pemerintah serius ingin program pengembangan iptek dan inovasi nasional berhasil, maka harus mengubah titik berat gravitasi, dari dominasi Pemerintah ke swasta.

"Sekarang ini dari aspek anggaran, peneliti dan kelembagaan litbang riset dan inovasi kita lebih dari 80%-nya didominasi oleh Pemerintah. Uang, aktor dan institusi riset semuanya pemerintah. Karenanya pembangunan Iptek lebih bersifat supply technology push, bukan karena tarikan pasar," ungkapnya.

Hal ini, kata Mulyanto, tidak alami, karena sejatinya aktor utama inovasi adalah

entrepreneur. Pemerintah bertugas membangun ekosistem inovasi, kebijakan, insentif dan disinsentif. Dan ini bukan melulu pekerjaan Kemenristek. Namun pemerintah secara keseluruhan.

"Untuk itu perlu transformasi struktural pembangunan Iptek dengan memindahkan titik berat gravitasi dari pihak pemerintah ke swasta/industri. Merekalah yang lebih faham kebutuhan pasar dan teknologi yang diperlukan," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan ini dalam serial webinar yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Munas ke-V PKS.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh Menristek Bambang P. Brojonegoro, guru besar ekonomi UI, Eko Prasjo, Letjen (Purn), M. Munir dari BIN

dan disaksikan oleh 48 ribu peserta ini, Mulyanto mengingatkan pentingnya membangun kualitas SDM Indonesia sebagai modal dasar pembangunan dan pengembangan iptek dan inovasi.

Mulyanto menambahkan tantangan Indonesia ke depan adalah meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk iptek dan inovasi dibanding produk bangsa lain. Untuk itu diperlukan program terencana dan sistematis membangun kualitas SDM unggul bangsa Indonesia.

"Ke depan peran pengembangan iptek dan inovasi memang tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah. Tapi harus dibangun ekosistem yang mendorong peran pihak swasta yang dominan dalam pengembangan program pengembangan iptek dan inovasi nasional. Sehingga manfaat Iptek dan inovasi bagi ekonomi dan pembangunan nasional benar-benar dirasakan. Bukan marginal seperti sekarang ini," tandas Mulyanto.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Sekarang ini dari aspek anggaran, peneliti dan kelembagaan litbang riset dan inovasi kita lebih dari 80%-nya didominasi oleh Pemerintah.

Uang, aktor dan institusi riset semuanya pemerintah. Karenanya pembangunan Iptek lebih bersifat supply technology push, bukan karena tarikan pasar

8 Fakta Tentang HITAM



Kemauan
keras



Disiplin



Kekuatan



Ketegasan

Perlindungan



Kepastian



Aspiratif



Berwibawa



H. M Nasir Djamil, M.Si.

Anggota Komisi II FPKS DPR RI

Keterangan;

Logo PKS terdiri dari tiga komposisi warna. Dengan warna dasar putih, motif jingga dan hitam PKS. Warna hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif, dan perlindungan;

Kunker Spesifik ke Jambi

Aleg PKS Lakukan Pengawasan Penyaluran Bantuan PKH di Masa Pandemi

KUTIPAN

Jambi (30/11) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik,

dalam rangka pengawasan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dampak sosial Pandemi Covid-19 ke Provinsi Jambi pada Rabu (25/11/2020).

Kegiatan kunjungan spesifik ini berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kota Jambi di Jalan Tambak Sari, Jambi Selatan, Kota Jambi.

Pada kesempatan ini Nur Azizah hadir Bersama 8 orang Anggota DPR RI lainnya yang tergabung dalam tim Kunker Komisi VIII DPR RI.

Tim yang diketuai oleh Ihsan Yunus, berasal dari 6 fraksi, terdiri dari satu Anggota Fraksi PKS, satu Anggota Fraksi PAN, satu Anggota Fraksi Partai Nasdem, dua Anggota Fraksi

Partai Gerindra, satu Anggota Fraksi Partai Golkar dan tiga Anggota Fraksi PDIP.

Pertemuan yang beragendakan diskusi terkait Penyaluran PKH Tahap IV pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Jambi ini turut dihadiri oleh tiga orang Sekretariat Komisi VIII DPR RI, satu Tenaga Ahli komisi VIII DPR RI, satu bidang Media Tv Parlemen, Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK-PKH) serta diterima oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi dan Kepala Balai Rehabilitasi Anak serta Pejabat Daerah terkait di Kota Jambi.

Pada kesempatan ini, Arief Munandar, Kedis Sosial Propinsi Jambi menjelaskan bahwa Dua Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) di Propinsi Jambi berjumlah lebih dari 200-an ribu, 102 ribu diantaranya adalah penerima bantuan PKH, dan penerima Bantuan Sosial Masa Pandemi Covid-19 berjumlah sekitar 187-an ribu.

Arief Munandar juga menyampaikan bahwa pendamping PKH saat ini berjumlah 597 orang se provinsi Jambi dan 60 diantaranya ada di Kota Jambi. Di tahun 2019 terdapat 1.000-an Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhasil graduasi, dan tahun 2020 jumlahnya meningkat 2000-an KPM mengalami graduasi.

Di hadapan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Rahmat Koesnadi, Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kemensos RI menyampaikan bahwa Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2020 sudah selesai tersalurkan sebanyak 376,5 M kepada 102.148 KPM PKH se-Propinsi Jambi. Sementara itu KPM PKH yang berhasil graduasi se-Propinsi Jambi sebanyak 8.864 KPM, sekitar 8,67%, mendekati target nasional 10%. Koesnadi juga menyampaikan permasalahan terkait Pendamping dan KPM PKH di Propinsi Jambi.

"Saat ini terkait penanggulangan stunting, perlu peningkatan peran Pendamping PKH untuk menyadarkan peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan mencegah KPM dari lilitan hutang dari bank atau lembaga keuangan mana pun seperti rentenir", jelas



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Kedepannya, Kota Jambi dan Propinsi Jambi mampu mencapai target Graduasi seperti Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang bisa melakukan graduasi melebihi target nasional 10 %. Syaratnya adalah konsisten menjalankan setiap program PKH, para pendamping PKH juga tidak lelah untuk terus memotivasi KPM PKH untuk dapat hidup mandiri dan sejahtera, serta terus mengingatkan para KPM agar tidak berhitung pada rentenir

Koesnadi.

Nur Azizah menyambut baik kondisi tersebut. Menurut Nur Azizah meskipun belum dapat mencapai target, pemerintah Propinsi Jambi telah mampu mendorong jumlah KPM untuk graduasi hingga mencapai 8,67% adalah upaya

yang luar biasa.

Nur Azizah menyampaikan bahwa Propinsi Jambi kedepannya bisa bekerja lebih intensif dalam menjalankan program-program PKH, agar angka graduasi semakin meningkat.

Selengkapnya di Fraksi.pks.id

Polemik Pencopotan Kepala KUA Tanah Abang

Bukhori: Kemenag Mau Jadi Pahlawan Kesiangan?

“Apakah Kemenag seolah-olah ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan memanfaatkan situasi panas yang terjadi akhir-akhir ini? Pasalnya, saya tidak menemukan penindakan serupa oleh Kemenag terhadap sejumlah Kepala KUA yang juga terlibat dalam sejumlah acara pernikahan yang turut mengundang kerumunan di masa pandemi sebelum polemik HRS ini mencuat”

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (24/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf angkat bicara terkait pencopotan Kepala KUA Tanah Abang karena diduga mengabaikan ketentuan terkait protokol kesehatan (prokes) saat menjalankan tugas pencatatan pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan (14/11/2020) lalu.

Bukhori menilai sikap Kementerian Agama menunjukkan inkonsistensi dan terkesan

politisi.

“Apakah Kemenag seolah-olah ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan memanfaatkan situasi panas yang terjadi akhir-akhir ini? Pasalnya, saya tidak menemukan penindakan serupa oleh Kemenag terhadap sejumlah Kepala KUA yang juga terlibat dalam sejumlah acara pernikahan yang turut mengundang kerumunan di masa pandemi sebelum polemik HRS ini mencuat”, sindir Bukhori di

Jakarta, Selasa (24/11).

Ketua DPP PKS ini merujuk pada kontroversi pesta pernikahan yang digelar oleh mantan Kapolsek Kembangan pada bulan Maret tahun 2020 silam dan acara resepsi pernikahan yang diselenggarakan oleh Kepala Kantor Kemenag Jombang pada bulan Oktober di tahun yang sama. Kedua acara pernikahan tersebut menjadi polemik di tengah publik karena dianggap mengabaikan protokol kesehatan selama pandemi.

“Alhasil, Kapolsek Kembangan dan Kepala Kantor Kemenag Jombang sebagai pihak penyelenggara terpaksa menerima sanksi berupa pencopotan dan mutasi dari masing-masing instansinya. Meskipun demikian, belum terdengar kabar dari Kemenag apakah Kepala KUA setempat turut dicopot akibat pelanggaran prokes tersebut,” ungkapnya.

Anggota Baleg Fraksi PKS ini meminta supaya Kemenag bisa bersikap secara proporsional. Alasannya, tindakan pencopotan Kepala



KUA dinilai sebagai respons yang berlebihan mengingat tanggung jawab Kepala KUA hanya pada ranah administratif dan bukan pada ranah penentuan kebijakan strategis.

Di sisi lain, Bukhori juga mengangap terjadinya kerumunan pada acara pernikahan putri Habib Rizieq merupakan kondisi force majeure sehingga bila terjadi pelanggaran prokes, maka tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Kepala KUA.

“Kemenag harus menjelaskan kepada publik seperti apa bentuk pelanggaran prokes yang dilakukan oleh Kepala KUA tersebut sehingga membuatnya dicopot. Sebab, jika dalihnya adalah karena

menciptakan kerumunan, sesungguhnya itu di luar kuasa Kepala KUA dan justru salah alamat bila dia yang harus diminta bertanggungjawab,” sambungnya.

Berdasarkan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 disebutkan bahwa dalam hal pengawasan pelaksanaan prokes di masyarakat dilakukan oleh TNI dan Polri dalam rangka memberikan dukungan kepada Gubernur, bupati/walikota.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Demi NKRI, HNW Dukung Pemerintah Berdialog dengan Habib Rizieq

“Memang diperlukan kenegarawanan dan keberanian moral untuk melakukan prakarsa dialog ini. Ketika wacana itu muncul dari Jubir Wapres, saya setuju dan sangat mendukung bisa dilakukan segera. Apalagi, sebagai Wapres sekaligus Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf dekat dengan Pak Jokowi dan Habib Rizieq

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (25/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mendorong agar Pemerintah segera berdialog atau bermusyawarah dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab secara hikmat dan bijaksana, manusiawi dan beradab, dan menjaga persatuan sesuai prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila.

“Habib Rizieq sendiri sudah membuka diri untuk berdialog dengan Pemerintah,

bahkan sejak 2017. Sekarang saatnya Pemerintah untuk mengambil inisiatif karena Habib Rizieq juga sudah berada di Indonesia, dan juga sudah menyatakan kesediaannya untuk berdialog,” ujarnya dalam sebuah diskusi secara virtual di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Dahulu saja, lanjut Hidayat, ketika terjadi gejala akibat pembakaran masjid di Tolikara, Pemerintah malah mengundang berbagai tokoh Papua untuk berdialog di Istana Negara. HNW sapaan akrabnya

mengatakan modal untuk melakukan dialog tersebut sebenarnya sudah ada sejak sebelum kedatangan Habib Rizieq yang akhirnya disambut positif oleh Pemerintah.

“Menkopolhukam Mahfud MD sudah memberikan sinyal baik agar terhadap kepulauan HRS, boleh dijemput oleh pengikutnya asal tertib, dan kepada aparat agar tidak berlebihan dalam pengawalan dan tidak melakukan pengamanan secara represif saat penyambutan Habib Rizieq oleh para pendukungnya. Dan itu semua akhirnya terbukti, kedatangan Habib Rizieq berlangsung aman, tertib dan damai,” ujarnya.

Namun, lanjut HNW, peristiwa yang sudah sangat baik itu ternyata dirusak oleh sekelompok pihak. Diantaranya, adalah kasus penghinaan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani dan sehingga menimbulkan kegaduhan dan mengubah image sebagian publik soal kepulauan HRS.

Apalagi dengan adanya



upaya mengadu domba antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan FPI dalam kasus penurunan baliho.

“Padahal pernyataan/sikap Pangdam Jaya, awalnya positif saja dengan kedatangan Habib Rizieq,” tuturnya.

HNW berharap kondisi tidak kondusif yang sudah melebar ke berbagai daerah, apalagi di tengah ancaman Kelompok Kekerasan Bersenjata di Papua yang semakin agresif, dan Covid-19 yang makin perlu penanganan yang fokus dan kerjasama oleh semakin banyak pihak ini, agar segera diakhiri, dengan dialog sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pancasila, dan dilaksanakan secara bijaksana

oleh kedua belah pihak. Toh, lanjut HNW, kedua belah pihak – baik Habib Rizieq maupun Pemerintah – tidak dalam posisi yang bermusuhan.

“Dalam ceramahnya, Habib Rizieq menegaskan berulang bahwa dirinya tidak memusuhi TNI, Polri atau pun Pemerintah. Melainkan memusuhi kezaliman, dan memusuhi korupsi, hal-hal yang pasti juga dimusuhi oleh Pemerintah,” katanya.

Oleh karena itu, HNW berharap agar Pemerintah via Menkopolhukam Mahfud MD yang sudah pernah mengirim sinyal positif, untuk bisa segera mengambil bola memprakarsai dialog ini. Selengkapnya di fraksi.pks.id



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***

Sosialisasikan Program
JKN-KIS di Dapil

Netty Minta BPJS **Evaluasi** Pelayanan Peserta

KUTIPAN

Indramayu (30/11) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, meminta BPJS agar melakukan evaluasi pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) agar standar kepuasan pelanggan terpenuhi.

"Momentum akhir tahun penting dimanfaatkan untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan BPJS dalam memenuhi standar kepuasan pelanggan," ujar Netty dalam keterangan media, Senin (30/11).

Netty yang hadir secara daring dalam kegiatan Sosialisasi Program JKN - KIS di Kokab Cirebon Indramayu, 28-29 November 2020 ini menyampaikan bahwa kesehatan adalah hak rakyat yang dijamin negara, sehingga BPJS sebagai badan penyelenggara harus

memastikan program jaminan ini berjalan dengan baik.

"Terdapat sejumlah catatan kritis untuk BPJS dalam penanganan program JKN - KIS. Misalnya, sengkaret data NIK, akses online dan layanan faskes yang masih banyak dikeluarkan rakyat. Saya meminta BPJS agar terus melakukan perbaikan manajemen internal dan kolaborasi optimal dengan para pemangku kepentingan agar pelayanan ke depan makin paripurna" ujarnya.

Kepala Cabang BPJS Cirebon, Kuningan dan Indramayu,

Budi Setiawan memaparkan bahwa sebagai asuransi sosial, BPJS tentu berbeda dengan asuransi komersial, yang mana BPJS tidak berorientasi pada profit tapi pada pelayanan masyarakat.

"Kami terus melakukan peningkatan pelayanan guna memperbaiki hal-hal yang dianggap masih kurang. Untuk mempermudah akses, telah ada aplikasi Mobile JKN berbasis android yang dapat diunduh melalui smartphone. Kami pun membuka hotline service Pandawa (Pendaftaran melalui WA) dan BPJS Satu (Siap Membantu) Pelayanan di Rumah Sakit yang dilayani oleh admin untuk menjawab pertanyaan seputar informasi peserta dan persoalan jaminan di rumah sakit" kata Budi.

Dalam kesempatan tersebut Netty juga mengimbau masyarakat agar bergotong-royong menyukseskan program JKN - KIS.

"Negara belum mampu menjamin pembiayaan kesehatan untuk seluruh rakyat. Oleh sebab itu, tertib membayar iuran dan tertib mengikuti prosedur adalah cermin sikap gotong-royong dari seluruh rakyat," katanya.

Kegiatan sosialisasi program JKN -KIS dihadiri oleh masyarakat Kokab Cirebon dan Indramayu dari kalangan ibu-ibu majelis taklim, guru, serta pemuda milenial kampus dan sekolah.

Netty juga meminta



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

Terdapat sejumlah catatan kritis untuk BPJS dalam penanganan program JKN - KIS. Misalnya, sengkaret data NIK, akses online dan layanan faskes yang masih banyak dikeluarkan rakyat. Saya meminta BPJS agar terus melakukan perbaikan manajemen internal dan kolaborasi optimal dengan para pemangku kepentingan agar pelayanan ke depan makin paripurna

masyarakat agar menjaga kesehatan sebagai tindakan pencegahan dari jatuh sakit.

"Kita harus mengubah paradigma kesehatan dari kuratif (mengobati) menjadi preventif dan promotif (mencegah dan mempromosi-

kan). Apalagi di masa pandemi ini, di mana penularan Covid-19 masih tinggi dan lonjakan kasus terus terjadi. Jaga kesehatan dengan hidup lebih bersih, lebih sehat, lebih disiplin dengan menjalankan proses 3M" ujarnya

Anis Sarankan Pemerintah Gandeng Koperasi Salurkan Dana PEN untuk UMKM

“Untuk mengakomodasi sektor mikro ini, pemerintah bisa menggandeng koperasi selain bank milik pemerintah. Dan untuk menghindari dana UMKM ini tidak tersalurkan tepat sasaran, pengawasan harus lebih ditingkatkan khususnya pengawasan di daerah

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (26/11) — Dukungan terhadap UMKM yang terdampak Covid-19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan oleh Pemerintah, telah terserap sebesar Rp 92,6 triliun atau 75% dari paku sebesar Rp 123,46 triliun.

“Meskipun tercatat sebagai serapan tertinggi kedua setelah anggaran kesehatan, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, stimulus ini masih bisa dimaksimalkan,”

demikian ungkap Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR RI di Jakarta (25/11/2020).

Hal ini disampaikan Anis, merespon data yang disampaikan Dirjen Pajak yang menyebutkan bahwa per Juli 2020, sebanyak 84,20 % pengusaha UMK mengalami penurunan pendapatan karena dampak Covid-19.

Disaat yang sama, para pelaku UMK belum tersentuh oleh layanan perbankan sehingga mengalami kesulitan Ketika berhadapan dengan rentenir

atau kreditur berbunga tinggi.

Politisi PKS ini

menjelaskan bahwa jumlah UMKM di Indonesia kurang lebih mencapai 64 juta unit. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan serapannya dalam satu bulan terakhir ini, pemerintah perlu membuat diversifikasi skema penyaluran bantuan kepada UMKM.

“Untuk mengakomodasi sektor mikro ini, pemerintah bisa menggandeng koperasi selain bank milik pemerintah. Dan untuk menghindari dana UMKM ini tidak tersalurkan tepat sasaran, pengawasan harus lebih ditingkatkan khususnya pengawasan di daerah,” ujar Anis.

Berdasarkan data OJK, hingga April 2020 tercatat sebanyak 10 juta UMKM yang dikategorikan berpotensi menerima restrukturisasi. Jumlah ini hanya sebesar 15,6% dari total UMKM.

“Selama ini, pemerintah masih menyalurkan bantuan kepada UMKM melalui bank. Padahal, banyak UMKM



utama level mikro yang tidak terjangkau oleh bank (unbankable),” tegas Anis.

Sebagian besar UMKM masih kesulitan mengakses layanan kredit formal, baik dari dari perbankan maupun Lembaga keuangan lain. Hal ini menyebabkan program restrukturisasi kredit UMKM tidak membantu sebagian besar UMKM di Indonesia.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga mengingatkan agar pemerintah memikirkan kebijakan

ambahan untuk membantu UMKM.

“Pemerintah perlu memastikan 1545 BPR/BPRS dan koperasi-koperasi juga mendapatkan akses yang adil dalam program restrukturisasi. Beban tekanan likuiditas dan risiko kredit juga lebih besar di BPR/BPRS, sehingga penting untuk memastikan bagaimana mereka dapat menjangkau penempatan dana pemerintah pada bank-bank peserta untuk program restrukturisasi,” tutupnya.

Wakil Ketua FPKS: Utang Pemerintah Makin Mengkawatirkan

lonjakan utang ini mengkhawatirkan, terutama terkait dengan komposisi utang Pemerintah yang didominasi oleh SBN dengan porsi bisa mencapai 80 persen, sementara penguasaan asing di SBN cukup signifikan.

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (27/11) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mempertanyakan langkah pemerintah yang dinilai jor-joran menambah utang.

Padahal, berdasarkan data terkini utang Pemerintah terus membengkak menjadi sebesar Rp 5.877,77 triliun per akhir Oktober 2020.

"Terjadi penambahan utang sebesar Rp 1.121 triliun hanya dalam satu tahun periode yang sama dari 2019," kata Ecky di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (27/11).

Ecky memperingatkan

risiko pengelolaan utang atas kesinambungan fiskal jangka panjang terkait dengan meroketnya jumlah utang negara.

"BPK RI sudah memberikan warning situasi ini, sebagaimana termaktub dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester oleh auditor negara," kata Ecky.

Menurutnya lonjakan utang ini mengkhawatirkan, terutama terkait dengan komposisi utang Pemerintah yang didominasi oleh SBN dengan porsi bisa mencapai 80 persen, sementara penguasaan asing di SBN cukup signifikan.

Menurut legislator PKS ini permasalahan membengkaknya utang dipicu oleh kekurangan tepatan dan kurang cermatnya Pemerintah mengelola anggaran negara.

"Shortfall pajak selalu berulang dan kinerja perpajakan memburuk dalam lima tahun terakhir ini dengan rata-rata realisasi hanya sebesar 86 persen, itupun belum terjadi pandemi seperti sekarang ini" kata Ecky.

Menurut Wakil Ketua FPKS ini realisasi anggaran pun selalu lemah dan menumpuk di akhir tahun yang berakibat kurang efektif dan tidak berkualitasnya anggaran negara.

"Dengan sisa waktu sekitar 30 harian tapi realisasi anggaran total baru mencapai 75 persen dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya 60 persen, bagaimana mungkin kualitas anggaran meningkat, padahal utangnya sudah kadung membengkak." Ujar Ecky.





IKUTILAH

مسابقة قراءة الكتاب فتح المعين

LOMBA BACA KITAB KUNING^{IV} TINGKAT NASIONAL 2020



Persembahan
Fraksi PKS DPR RI
Dalam Rangka Peringatan
Hari Santri Nasional 2020
dan Peringatan 16 Tahun
Fraksi PKS DPR RI

KITAB YANG DIBACA

Kitab yang dibaca adalah Kitab
Fathul Mu'in Karya Syaikh
Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibary

SYARAT PESERTA

- 1 Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2 Putra/Putri yang tercatat sebagai santri pesantren
- 3 Usia 17 - 25 tahun
- 4 Pendidikan minimal Madrasah Aliyahatau yang sederajat
- 5 Mendapat rekomendasi dari pimpinan pondok pesantren
- 6 Belum pernah menjadi juara 1 - 3 Lomba Kitab Kuning FPKS tingkat Nasional (2016-2018)



BERHADIAH UTAMA UMRAH

Raih Juara Rebut Hadiyahnya

Juara 1	UMRAH	Juara Harapan 1	Rp 15.000.000,-
Juara 2	Rp 25.000.000,-	Juara Harapan 2	Rp 10.000.000,-
Juara 3	Rp 20.000.000,-	Juara Harapan 3	Rp 5.000.000,-

Setiap Peserta akan mendapat sertifikat yang ditandai tangani oleh
Ketua Majelis Syura, Presiden PKS dan Ketua Fraksi PKS DPR RI

AGENDA PELAKSANAAN

Masa Pendaftaran
22 Oktober - 15 November 2020

Babak Penyisihan di 34 Provinsi
Babak Penyisihan akan diselenggarakan antara 16 November 2020 hingga 13 Desember 2020 bertempat di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) di 34 Provinsi se Indonesia.

Babak Final
22 Desember 2020

DEWAN JURI

KH. Syuhada' Syarkun, S.Ag., M.HI.
(Pesantren Tebuireng-Jombang Jatim)
KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA
(Ketua Umum MAPADI)
Dr. KH. Ali Akhmadi, MA, Al-Hafidz
(Ketua BPU-DPP PKS)

NARAHUBUNG

0856-4554-6397
Agus. A. Wahid MG, SPd, M.Sc.
0822-6062-1141
Susiaty Puspasari, B.Sc., M.Sc.
0813-2025-0848
Iman Sulaiman, Lc.
0813-8642-7673
Dr. Suesilowati



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



H. Ahmad Syaikhul
Presiden PKS

Habib Dr. Salim Segaf Aljufri, MA
Ketua Majelis Syura PKS

RUU Ketahanan Keluarga Sejalan dengan Konstitusi dan Mendukung Kemajuan Bangsa

Aspek perlindungan khusus Keluarga berupa perlindungan dari tindak diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual, dan aspek pemenuhan hak akses informasi bagi Keluarga. Maka dari itu, penting kiranya agar RUU ini bisa dilanjutkan pembahasannya ke tingkat lanjut”

Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (24/11) — Anggota Baleg DPR RI Al-Muzammil Yusuf menyampaikan sejumlah pertimbangan penting yang menjadi landasan bagi Fraksi PKS untuk mendukung RUU Ketahanan Keluarga.

Ia menyatakan bahwa RUU Ketahanan Keluarga sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya pasal 31 ayat 3 yang berbunyi 'Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang', dan sejalan pula dengan UU Sisdiknas.

"Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan tumbuh kembang setiap anak bangsa melalui pendidikan nasional yang berkualitas. UU Sisdiknas telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan ketika menjabarkan tentang pendidikan informal, maka yang pertama disebutkan (dalam UU

Sisdiknas) adalah peran keluarga. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa keluarga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah” terang Al-Muzammil dalam Rapat Pengambilan keputusan atas Harmonisasi RUU tentang Ketahanan Keluarga di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Menurutnya, Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga diperlukan sebagai payung hukum dalam mengatur mengenai Ketahanan Keluarga. Hal ini karena peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai keluarga yang berlaku saat ini, seperti UU Nomor 52 Tahun 2009, dirasa masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

“UU No. 52 Tahun 2009 telah kita dalam di Panja. Dan dalam kesimpulan kita, UU ini fokus pada jumlah dan kuantitas penduduk saja. Namun, pasal yang terkait pembangunan keluarga yang dijelaskan dalam RUU ini



(Ketahanan Keluarga), belum dimuat secara mendetail di UU sebelumnya”, ungkap Anggota DPR dari Dapil Lampung ini.

Selain itu, lanjut Al-Muzammil, RUU Ketahanan Keluarga hadir dengan serangkaian ketentuan hukum yang komprehensif dengan mendorong Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga sebagai strategi untuk mengintegrasikan keluarga dalam setiap tahap dan siklus pembangunan negara.

“Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga mencakup aspek pemenuhan hak dasar Keluarga, aspek perlindungan dari Kerentanan Keluarga, termasuk namun tidak terbatas pada perlindungan kerentanan pangan, sandang, ketidaklayakan tempat tinggal dan lingkungan, pendidikan,

kehatan, pekerjaan, dan rasa aman, aspek perlindungan khusus Keluarga berupa perlindungan dari tindak diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual, dan aspek pemenuhan hak akses informasi bagi Keluarga. Maka dari itu, penting kiranya agar RUU ini bisa dilanjutkan pembahasannya ke tingkat lanjut”, pungkas Al-Muzammil.

Diketahui, dalam rapat yang baru saja berakhir siang tadi (24/11), PKS menjadi salah satu fraksi yang menerima RUU ini bersama dengan tiga fraksi lainnya, yakni Fraksi PAN, Gerindra, dan PPP. Sedangkan, lima fraksi lain di DPR RI menyatakan menolak untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya.

Anggota Baleg FPKS: Tidak Ada Urgensi untuk Meneruskan RUU HIP

Pemerintah tidak mengajukan secara resmi RUU BPIP untuk masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2019-2024, termasuk juga untuk prolegnas prioritas tahun 2021. Jadi tidak ada unsur yang mendesak atau urgensinya untuk meluncurkan RUU HIP inisiatif DPR yang tidak ditindaklanjuti Pemerintah ini ke dalam prolegnas prioritas tahun 2021”

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (27/11) — Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, menegaskan sebaiknya RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak dimasukkan kembali ke dalam prolegnas prioritas 2021.

Menurut Anggota Baleg ini, DPR harus mempertimbangkan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, agar tidak menimbulkan kegaduhan baru.

Mulyanto mengatakan tidak ada urgensinya untuk meneruskan RUU HIP. Masyarakat yang menjadi dasar empirik-sosiologis pembentukan perundangan banyak yang

menolak. Termasuk juga Pemerintah.

"Sebelumnya ketika menyampaikan Surat Presiden (Surpres), Pemerintah tidak mengajukan DIM RUU HIP, yang merupakan RUU inisiatif DPR, tetapi malah mengajukan DIM RUU BPIP sebagai inisiatif Pemerintah," terangnya.

Namun di sisi lain, lanjut Mulyanto, Pemerintah tidak mengajukan secara resmi RUU BPIP untuk masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2019-2024, termasuk juga untuk prolegnas prioritas tahun

2021.

"Jadi tidak ada unsur yang mendesak atau urgensinya untuk meluncurkan RUU HIP inisiatif DPR yang tidak ditindaklanjuti Pemerintah ini ke dalam prolegnas prioritas tahun 2021", kata Mulyanto.

Rencananya hari ini, Jumat (27/11) akan dilaksanakan Raker Baleg DPR RI dengan Menkumham dan DPD RI untuk memutuskan Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Namun karena masih belum siap, nampaknya ditunda pada kesempatan terdekat.

Mulyanto minta, kali ini DPR dan Pemerintah benar-benar mau mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan masyarakat. Mulyanto melihat masih banyak RUU yang lebih layak dan mendesak untuk dibahas daripada RUU HIP yang mengundang kontroversi tersebut.

"Secara tegas PKS menolak RUU HIP dimasukan ke dalam prolegnas prioritas tahun 2021", tandas Mulyanto mengakhiri.



*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Jelang Pilkada Indramayu

Netty & Kang Aher Kunjungi Cawabup Indramayu

Keyakinan kita untuk melakukan perubahan kondisi Indramayu menjadi bertasbeh, bersih, tuntas dan berkah akan menjadi modal utama dalam proses kemenangan Sholawat. Setelah itu, ikhtiar maksimal di lapangan dengan beragam program pendekatan pada masyarakat.

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

Indramayu (22/11) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani didampingi Gubernur Jabar 2008 -2018, Ahmad Heryawan (Aher), menyambangi Cawabup Indramayu Ratnawati di Rumah Aspirasi Sholawat (Sholihin - Ratnawati), Jatibarang, Indramayu.

Paslon Sholawat dalam pilkada Indramayu didukung oleh partai koalisi yaitu PKB, Demokrat, PKS, PPP dan Hanura.

Dalam kesempatan tersebut Netty menyampaikan bahwa motivasi dan keyakinan yang kuat akan menjadi modal kemenangan.

"Keyakinan kita untuk melakukan perubahan kondisi Indramayu menjadi bertasbeh, bersih, tuntas dan berkah akan menjadi modal utama dalam proses kemenangan Sholawat. Setelah itu, ikhtiar maksimal di lapangan dengan beragam program pendekatan pada masyarakat," ujar Netty dalam keterangan media, Minggu, (22/11).

Netty dan Ratnawati juga membincang tentang tingkat survey paslon Sholawat media November ini.

Berkat rahmat Allah, upaya yang kita lakukan membuahkan hasil. Survey elektabilitas Sholawat meningkat tajam,

dibandingkan start awal. Bahkan entitas yang diperkirakan akan mendukung paslon lain, justru banyak yang menyatakan keberpihakan pada Sholawat," jelas Herman Khoiron, suami Ratnawati yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat.

Sementara Kang Aher mengingatkan Sholawat, agar terus melakukan pendekatan langsung pada banyak jaringan di lapangan.

"Survey penting, namun jangan dijadikan satu-satunya patokan. Lakukan terus penetrasi pada semua jaringan yang dapat memberi dukungan, baik dari kalangan orang tua,



kam Ibu mau pun kelompok milenial," ujarnya.

Sebagai penutup, Netty mengingatkan agar semua paslon Pilkada Indramayu, utamanya paslon Sholawat, tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap pertemuan dengan basis massa.

"Pandemi Covid-19 belum

berakhir. Kita jangan sampai lepas kendali. Pastikan tidak terjadi kerumunan massa dan proses 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) harus dilakukan dengan disiplin dan ketat. Jangan sampai kita ingin melakukan perubahan dengan mengorbankan rakyat," tandasnya.

Nevi Zuairina Apresiasi Sumatera Barat Juara Umum MTQ Nasional

Kami segenap warga Sumatera Barat, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat merasa sangat bangga atas prestasi ini. Mudah-mudahan serimonial ini bukan hanya sebatas penampilan, tapi menjadi darah daging warga Sumatera Barat dalam pesan tersirat MTQ Nasional ini. Yakni mengagungkan Al Quran dan mengamalkan dalam setiap sendi kehidupan kita

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

Padang (22/11) — Legislator asal Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina mengapresiasi Sumatera Barat dinobatkan mendapat juara umum pada MTQ Nasional XXVIII.

Nevi menyampaikan merupakan kebanggaan semua warga Sumatera Barat atas anugerah juara umum memuliakan Al Quran yang diselenggarakan negara Indonesia.

Nevi yang juga ketua Dekranasda Sumatera Barat ini mengatakan, Sumbar kini juara umum MTQ memecahkan mitos karena belum pernah juara umum karena pemenang dari propinsi lain. Kini akhirnya dengan sungguh sungguh persiapan selama dua tahun, dengan kerja keras yang sungguh-sungguh, kafilah MTQ membawa Sumbar juara umum

MTQ ke 28.

"Kami segenap warga Sumatera Barat, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat merasa sangat bangga atas prestasi ini. Mudah-mudahan serimonial ini bukan hanya sebatas penampilan, tapi menjadi darah daging warga Sumatera Barat dalam pesan tersirat MTQ Nasional ini. Yakni mengagungkan Al Quran dan mengamalkan dalam setiap sendi kehidupan kita", tutur Nevi.

Anggota DPR RI dapil Sumbar II ini juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan MTQ Nasional ini mulai dari persiapan, Pelaksanaan, Acara lirikan yang semua memerlukan konsentrasi, tenaga fisik dan pikiran terkuras untuk mensukseskan acara nasional ini. Karena Sumatera Barat sudah lama sekali tidak menjadi tuan rumah, mudah-mudahan semua peserta dari pelosok nusantara mendapat kesan yang baik akan Sumatera Barat.

Nevi mengatakan, bahwa



semua elemen institusi di Sumatera Barat mengakui, bahwa kemenangan juara Umum MTQ Nasional ke-28 ini merupakan kado terindah pemerintah Sumbar dan jajarannya, Mulai dari Gubernur hingga staff termasuk seluruh warganya.

Politisi PKS ini juga menyampaikan, selain acara MTQ Nasional yang sukses dilaksanakan, acara pendukung termasuk pameran UMKM juga sangat sukses terlaksana. Produk-produk UMKM yang sangat khas diharapkan di masa yang akan datang

semakin dikenal dan menjadi buruan para pecinta traveller dan para petualang.

"Kami semua sangat bangga dan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para kafilah pada khususnya yang telah membawa nama baik nan harum kepada Sumatera Barat yang meraih juara Umum. Tidak pula terima kasih kepada seluruh pihak secara umum yang berpartisipasi memeriahkan serta mensukseskan hajjat besar nasional ini", tutup Nevi Zuairina.

Temui Generasi Milenial, Aleg FPKS: Perkuat Nilai-Nilai Kebangsaan

Saat ini generasi milenial menghadapi tantangan arus informasi digital global dengan berbagai macam informasi yang masuk tanpa melalui instrumen penyang. Dampaknya terbentuk pola pikir dan gaya hidup yang sangat berbeda dengan yang dicita-citakan para pendiri bangsa yaitu beradab, sopan santun, dialogis, menghormati orang lain, menjaga etika dan moral

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

Jakarta (22/11) – Anggota DPR RI Dapil Sumbar I, Hermanto, dalam kunjungan ke daerah pemilihan menyempatkan diri bertemu kaum milenial Kabupaten Solok dan Tanah Datar.

Hal tersebut diadakan di Ruang Pertemuan Restoran Angin Berembus, Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Minggu (22/11/2020).

Pada pertemuan tersebut, Hermanto mengingatkan, bahwa saat ini generasi milenial

menghadapi tantangan arus informasi digital global dengan berbagai macam informasi yang masuk tanpa melalui instrumen penyang.

"Dampaknya terbentuk pola pikir dan gaya hidup yang sangat berbeda dengan yang dicita-citakan para pendiri bangsa yaitu beradab, sopan santun, dialogis, menghormati orang lain, menjaga etika dan moral," paparnya.

Lebih jauh Hermanto juga meminta generasi milenial agar memiliki pemahaman yang

benar dan kuat terhadap nilai dan sejarah lahirnya Pancasila.

"Hal tersebut penting guna menumbuh suburkan rasa kebangsaan ditengah semakin kuatnya arus informasi global yang dapat mempengaruhi gaya hidup permisivisme dan individualisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadaban dan kegyuban bangsa Indonesia," papar legislator dari FPKS ini.

Hermanto menambahkan, bahwa sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan



karakter bangsa Indonesia yang mesti melekat dan menjadi perilaku kehidupan sehari hari bagi anak bangsa untuk menguatkan kohesivitas sosial.

"Ditengah keringnya nilai-nilai spiritualitas akibat globalisasi informasi yang sangat bebas tanpa instrumen penyang tersebut, sejatinya Negara memiliki tugas dan kewajiban untuk terus

menumbuhkan, membentengi dan melindungi rasa kebangsaan generasi milenial," jelas Hermanto.

Hermanto juga menegaskan, bahwa rasa kebangsaan kaum milenial harus terus ditumbuhkan dan dijaga agar tidak kehilangan semangat juang mempertahankan NKRI.

Kunjungi Dapil, Rofik Resmikan Gedung TPQ Al Mustaqim

“Saya Berharap keberadaan Gedung TPQ Al Mustaqim ini semakin menambah semangat para santri dalam belajar Al Quran, sehingga nantinya mampu melahirkan generasi yang soleh dan solehah

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Purbalingga (22/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) asal Dapil Jawa Tengah VII Rofik Hananto meresmikan Gedung TPQ Al Mustaqim yang berada di Dusun 1 Desa Majatengah, Kec. Kemangkön, Kabupaten Purbalingga pada Sabtu (21/11/2020).

Acara ini dihadiri oleh Sar-kono (Kepala Desa Majatengah), Budi Haryono (BPD Majatengah), Pengurus dan pengasuh TPQ serta wali santri.

Pembangunan Gedung TPQ Al Mustaqim dapat terealisasi atas bantuan dana hibah senilai Rp. 100 Juta, aspirasi yang berhasil diperjuangkan oleh rekan satu partainya Aris Widiarso (Anggota DPRD Fraksi PKS Kabupaten Purbalingga).

Dalam sambutannya Rofik

mengapresiasi perjuangan yang telah dilakukan oleh rekan satu partainya ini, sehingga pembangunan gedung TPQ Al Mustaqim dapat direalisasikan.

“Saya mengapresiasi perjuangan yang telah dilakukan oleh rekan kami Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga saudara Aris Widiarso, sehingga

pembangunan gedung TPQ Al Mustaqim dapat direalisasikan.” Kata Rofik

Rofik berharap keberadaan Gedung TPQ Al Mustaqim ini semakin menambah semangat para santri dalam belajar Al Quran.

“Saya Berharap keberadaan Gedung TPQ Al Mustaqim ini semakin menambah semangat para santri dalam belajar Al Quran, sehingga nantinya mampu

melahirkan generasi yang soleh dan solehah.” Tambah Rofik

Aris Widiarso bersyukur dana hibah yang telah diperjuangkan dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga berdiri gedung TPQ dengan fasilitas yang cukup lengkap.

Ketua TPQ Al Mustaqim, Mangun mengucapkan terima kasih kepada Anggota Dewan Fraksi PKS yang telah menjabatani dana hibah senilai Rp. 100 juta untuk pembangunan gedung TPQ, dan alhamdulillah dengan dana tersebut pembangunan TPQ dapat selesai.

Pada kesempatan ini, Rofik juga memberikan bantuan uang senilai Rp. 10 juta untuk menambah fasilitas TPQ berupa pembangunan kamar mandi.



Hadiri Acara FORSITMA DKI Jakarta

Anis Ajak Seluruh Tokoh Berjuang bersama PKS

Kita harus senantiasa mengokohkan silaturahmi dan saling bekerjasama serta bersinergi dalam menggulirkan agenda-agenda keumatan seperti ini, mendidik dan mencerdaskan perempuan Indonesia sebagai ibu peradaban

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

Jakarta (23/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, hadir dan menjadi narasumber pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Majelis Ta'lim (FORSITMA) DKI Jakarta di hotel Balairung Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Senin (23/11).

Acara yang dihadiri oleh 150 peserta ini mengambil tema Meneladani Nabi Muhammad SAW dengan Berakhlak Terpuji, bertujuan untuk mengokohkan silaturahmi antara Anggota Dewan Perempuan DPR RI Fraksi PKS DAPIL DKI Jakarta, Anggota DPRD FPKS DKI Jakarta, pengurus Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS DKI Jakarta dan Tokoh Majelis Ta'lim dan Ustadzah se-DKI Jakarta.

Pada kesempatan ini, Anis yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan menyampaikan tugas dan wewenang DPR RI yang sangat strategis dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia.

"Kita harus senantiasa mengokohkan silaturahmi dan saling bekerjasama serta bersinergi dalam menggulirkan agenda-agenda keumatan seperti ini, mendidik dan mencerdaskan perempuan Indonesia sebagai ibu peradaban," kata Anis.

Anis menutup uraiannya dengan mengajak seluruh tokoh dan ustadzah majelis ta'lim se-DKI Jakarta untuk bahu membahu dan berjuang bersama PKS untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.



Tanggapi Perampasan Tanah Warga

Aleg PKS: Kami Akan Sampaikan ke ATR/BPN

“Kami dari fraksi PKS senantiasa memperjuangkan hak-hak rakyat dan akan terus kebersamai rakyat yang terdzolimi. Dalam kasus ini, jelas bahwa telah ada penyerobotan tanah yang merugikan rakyat. Padahal tanah sangat berhubungan dengan hajat hidup rakyat”

TEDDY SETIADI, S.Sos.

Anggota Komisi II DPR RI

Selasa (24/11) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menerima aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tangerang wilayah utara terkait permasalahan pertanahan yang mereka alami melalui platform virtual Zoom, Selasa (24/11).

Dalam pertemuan tersebut, warga yang berasal dari empat kecamatan di Kabupaten Tangerang, yaitu Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan, mengeluhkan kinerja BPN dan perangkat desa karena adanya penyerobotan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah oleh oknum mafia di wilayah mereka. Menurut mereka, total tanah yang dikuasai mafia tanah itu telah mencapai 900 hektar.

Menanggapi hal ini, Teddy

menyampaikan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal kasus ini dan memberikan dukungan semaksimal mungkin.

“Kami dari fraksi PKS senantiasa memperjuangkan hak-hak rakyat dan akan terus kebersamai rakyat yang terdzolimi. Dalam kasus ini, jelas bahwa telah ada penyerobotan tanah yang merugikan rakyat. Padahal tanah sangat berhubungan dengan hajat hidup rakyat”, ujar Anggota DPR Komisi II ini.

Ia pun menyatakan bahwa PKS akan berupaya memfasilitasi pertemuan dengan ATR/BPN Pusat, agar permasalahan ini dapat diketahui oleh pihak yang tepat dan diharapkan segera menemui titik terang.

“Kami mohon perwakilan warga untuk menyampaikan

data-data yang lengkap kepada kami untuk dipelajari. Mungkin di pekan ini kita bisa merencanakan pertemuan lanjutan secara offline di DPR RI untuk berdiskusi soal data dan menyamakan persepsi. InsyaAllah, di hari Kamis depan (03/12) ada jadwal rapat Komisi II dan ATR/BPN. Nanti kita akan menyampaikan keluhan Bapak/Ibu kepada pihak ATR/BPN”, jelas Teddy.

Sebelumnya, ratusan warga yang mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Tangerang Wilayah Utara ini telah berunjuk rasa di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang sebanyak dua kali, yakni pada bulan Agustus dan Oktober, tetapi belum ada kejelasan hingga saat ini.



Andi Akmal Serahkan Mesin Perontok Padi dan Pompa Air Irigasi Tersier di Kab. Bone

Saya sangat antusias ketika masyarakat dapat mengalami peningkatan kebahagiaan akibat kontribusi yang saya lakukan. Ini menjadi indikator kinerja kami di Fraksi PKS dalam bekerja selain fungsi legislasi, anggaran, pengawasan yang menjadi tugas Pokok sebagai anggota DPR

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

Kabupaten Bone (21/11) — Legislator asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, menyerahkan bantuan berupa alat mesin pertanian untuk petani di kabupaten Bone.

Kali ini jenis Alsintan yang diserahkan berupa Power Thresher (mesin perontok padi dan perontok jagung), Mesin pompa air dan instalasi perpipaan untuk irigasi tersier.

Semangat Anggota DPR RI kelahiran Bone ini tidak putus dan tidak mengenal masa sidang atau masa reses, ia terjun ke lapangan secara terus menerus bertemu masyarakat.

Setiap pertemuan yang

dilakukan Akmal ketika bertemu masyarakat setidaknya membawa dua tujuan sekaligus, yakni menyerahkan bantuan yang ia advokasi dari program pemerintah, juga sekaligus menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat yang mendasar untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya sangat antusias ketika masyarakat dapat mengalami peningkatan kebahagiaan akibat kontribusi yang saya lakukan. Ini menjadi indikator kinerja kami di Fraksi PKS dalam bekerja selain fungsi legislasi, anggaran, pengawasan yang menjadi

tugas Pokok sebagai anggota DPR", jelas Akmal.

Akmal berpesan kepada masyarakat bone, termasuk pada relawan dan team yang selalu mendampinginya, untuk selalu bekerjasama dan saling memberi masukan dalam setiap kegiatan bermasyarakat terutama di kabupaten Bone.

Alat Mesin Pertanian ini, kata Akmal, hanya sarana saja untuk mempermudah para petani dalam menjalankan aktivitasnya sebagai petani mulai dari persiapan produksi hingga pasca panen. Ia meminta agar adanya mesin ini akan mempersatukan tiap individu petani dalam kelompok-kelompoknya. Segala sumber konflik akibat penggunaan alat sedapat mungkin dapat dihindari.

"Semoga alat mesin pertanian ini dapat bermanfaat dan untuk kelompok-kelompok tan yang aktif semoga di lain kesempatan dapat menerima bantuan-bantuan berikutnya yang masih dalam proses pengajuan", tutup Andi Akmal Pasluddin.



Temu Konstituen, Habib Aboe Tegaskan Masyarakat Jangan Mau Diadu Domba

“Sejak zaman sebelum kemerdekaan kita ini menyadari bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Karena perbedaan itulah, kemudian kita menyatukan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang saat sudah merdeka, jangan sampai kita di pecah belah dan diadu domba”

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

Banjarmasin (25/11) — Jangan mau diadu domba, demikian pesan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi saat bertemu konstituen di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (25/11).

“Sejak zaman sebelum kemerdekaan kita ini menyadari bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Karena perbedaan itulah, kemudian kita

menyatukan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang saat sudah merdeka, jangan sampai kita di pecah belah dan diadu domba”. Papar Anggota DPR RI dari Dapil Kalsel 1 tersebut.

Lebih lanjut Habib Aboe mengingatkanc bahwa banyak pihak asing yang ingin menguasai sumberdaya dalam negeri.

“Ketika mudah dipecah belah, maka mereka para pihak asing akan mudah masuk dan

mengeruk sumberdaya alam yang ada di Indonesia. Karenanya itu tidak boleh terjadi, sesama anak bangsa harus kompak mengamankan NKRI dari kepentingan asing”, terang Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

“Oleh karenanya setiap anak bangsa harus memahami apa makna Bhineka Tunggal Ika. Ini adalah semboyan yang dipilih para bapak bangsa untuk mengingatkan agar seluruh masyarakat memiliki spirit



persatuan diatas perbedaan. Sikap ini harus dikedepankan agar kita tidak mudah dibenturkan antara satu dengan yang lain” papar Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI tersebut.

Pria yang kerap disapa Habib tersebut menyatakan sangat prihatin melihat

banyaknya sikap saling hujat di media sosial.

enurutnya sikap seperti itu bukanlah jadi diri anak bangsa. Karenanya, adanya sosialisasi Empat Pilar yang selama ini dilakukan adalah dalam upaya mempertahankan jati diri bangsa

Pembagian 25 Ribu Masker Medis, Bukhori Singgung Kebijakan Bupati Kendal

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan, merupakan ujung tombak penanganan Covid-19. Mereka sudah bertaruh nyawa, maka jangan lagi mereka dipersulit dengan urusan teknis seperti pemenuhan kebutuhan masker dan lain sebagainya

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

Kabupaten Kendal (25/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyalurkan bantuan sebanyak 25 ribu masker medis kepada puskesmas Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Selain bantuan masker, Anggota legislatif dapil Jateng I ini juga menyerahkan bantuan sejumlah alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan di sana.

Bantuan ini diberikan sebagai wujud keprihatinannya mendengar laporan bahwa sejumlah tenaga kesehatan tanpa secara swadaya untuk

membeli masker dan perlengkapan penunjang keselamatan lainnya dalam penanganan Covid-19.

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan, merupakan ujung tombak penanganan Covid-19. Mereka sudah bertaruh nyawa, maka jangan lagi mereka dipersulit dengan urusan teknis seperti pemenuhan kebutuhan masker dan lain sebagainya,” tegasnya saat melakukan penyerahan bantuan di Puskesmas Kaliwungu, Selasa (24/11/2020).

Sejumlah APD yang dibagikan antara lain 25.000

masker, 9 paket komplet APD dan 1 dus hazmat. Selain di Kaliwungu, bantuan serupa juga akan didistribusikan ke 10 puskesmas rawat inap di Kabupaten Kendal.

Anggota Baleg DPR RI juga menuturkan salah satu masalah krusial di tingkat puskesmas adalah kebutuhan masker dalam jumlah banyak tetapi tidak dibarengi oleh persediaan yang memadai. Pasalnya, selain untuk kepentingan tenaga kesehatan, masker juga diperlukan oleh pasien selama dalam penanganan.

“Idealnya setiap 4 jam sekali harus ganti masker,



tetapi saat ini baru bisa disediakan 1 hari sekali berdasarkan keluhan yang saya terima,” imbuhnya.

Selain mengeluhkan persediaan masker yang terbatas, para tenaga kesehatan di puskesmas juga mengeluhkan kebijakan Bupati Kendal yang akan dilaksanakan tahun 2021 terkait pencabutan seluruh subsidi terhadap puskesmas. Sementara, puskesmas ini belum memiliki

persiapan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Kita akan coba advokasikan hal ini kepada stakeholders terkait dengan memanfaatkan sumberdaya yang kami miliki. Sudah sepatutnya keputusan terkait kebijakan strategis di daerah mempertimbangkan aspirasi masyarakat terdampak supaya tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.

Kundapil Depok,

Nur Azizah Tamhid Kunjungi Tokoh Agama Khonghucu Kota Depok

● KUTIPAN

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A., lakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Kota Depok.

Nur Azizah menemui Suwito, salah satu pengurus Masyarakat Khonghucu Indonesia (MAKIN) Depok pada Ahad (22/11) di kediaman Jl. Perikanan, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Di hadapan Suwito yang juga menjabat sebagai pimpinan Rumah Ibadah Khonghucu Kong Miao Genba Kebajikan Pitara, Depok, Nur Azizah mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Khonghucu Depok yang telah memberikan dukungan padanya dalam pemilihan legislatif (pileg) 2019 lalu.

“Saya berterimakasih atas dukungan dan pengorbanan Bapak Suwito, istri serta masyarakat Khonghucu yang telah mengantarkan saya menjadi anggota DPR RI. Setiap

anggota DPR RI diminta untuk datang langsung ke masyarakat yang menjadi konstituen di wilayah dapilnya agar dapat terus menjalin hubungan komunikasi yang erat”, jelas Nur Azizah.

Pada kesempatan ini Nur Azizah turut melakukan diskusi terkait permasalahan kesejahteraan lanjut usia, dimana Nur Azizah tergabung menjadi panitia kerja (panja) Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Lanjut Usia (RUU KLU). Nur Azizah menilai dalam proses merancang undang-undang kesejahteraan lansia, harus secara komprehensif dapat menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, karena kesejahteraan lansia ini merupakan hak bagi lansia dari

seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Suwito mengapresiasi Nur Azizah yang begitu dekat dengan konstituen. Suwito menilai, sebagai pejabat publik Nur Azizah begitu perhatian dan sangat rajin mengunjungi konstituen, “Saya berterimakasih dan sangat mengapresiasi ibu Nur yang banyak memberikan perhatian, ini adalah kali ketiga saya bertemu ibu Nur, dua diantaranya setelah ibu Nur menjabat menjadi Anggota DPR RI pada tahun 2019”, terang Suwito.

Suwito menambahkan bahwa dalam agama Khonghucu, lansia adalah orang tua yang sangat harus kita cintai dan hormati. “Makanya dalam hal laku bakti, adanya rumah panti jompo atau penampungan lainnya, apabila setiap orang hormat dan mengasih orang tua, tempat-tempat itu sudah tidak lagi dibutuhkan”, jelas Suwito. Suwito menambahkan, Jika semua pemimpin hormat pada orang tua dan rakyat cinta pada orang tua maka damai negeri ini. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Nur Azizah turut sendapat dengan pernyataan Suwito, ia pun memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat mensukseskan RUU KLU agar dapat kesejahteraan masyarakat lansia di Indonesia. “Saat ini tujuan utama saya dari menjadi panja RUU KLU adalah ingin



Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, saat beramah tamah dengan Bapak Suwito, salah satu pengurus Masyarakat Khonghucu Indonesia (MAKIN) Depok

Pada kesempatan ini Nur Azizah turut melakukan diskusi terkait permasalahan kesejahteraan lanjut usia, dimana Nur Azizah tergabung menjadi panitia kerja (panja) Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Lanjut Usia (RUU KLU).

lebih menghormati lansia, ingin bisa memberikan perlindungan kepada para lansia, ingin bisa melayani lansia”, tutur Nur Azizah.

Nur Azizah menambahkan bahwa yang lebih penting dari RUU KLU ini adalah upaya-upaya mengakui bahwa lansia di atas 60 tahun itu sebenarnya bukan orang yang tidak berguna. Masih banyak orang usianya di atas 65 tahun yang

masih punya potensi, punya kemampuan. “Nah itu kira-kira, selain harus dicintai dan dilindungi, masyarakat lansia harus diberi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya, serta diberikan fasilitas yang memadai untuk mereka (lansia) bekerja, sehingga tetap bisa merasa berdaya dan bahagia”, pungkask Nur Azizah.



الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إنا لله وإنا إليه راجعون



Keluarga besar Fraksi PKS DPR RI
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah

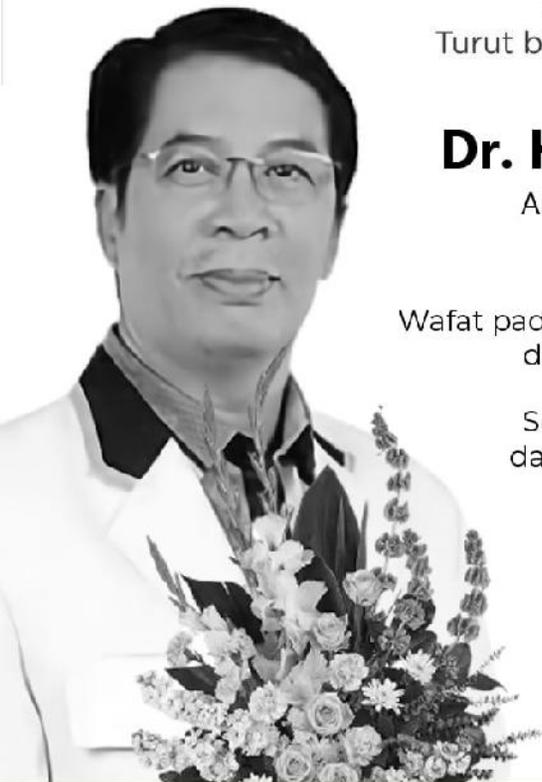
Dr. H. Nur Supriyanto, M.M.

Anggota DPRD FPKS Prov. Jawa Barat &
mantan Calon Walikota Bekasi PKS

Wafat pada Kamis, 26 November 2020 pukul 23.00 WIB
di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi

Semoga Almarhum Husnul Khatimah
dan mendapatkan tempat yang terbaik
disisi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Aamiin aamiin yarobbal alamiin

Habib Aboe Bakar Alhabsyi
Ketua MKD DPR RI



Terkait Upaya Judicial Review
UU Cipta Kerja

Aleg PKS: Kami Mendukung karena Dijamin Konstitusi

KUTIPAN

Jakarta (01/12) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyatakan dukungannya

terhadap upaya Judicial Review yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini disampaikannya saat menerima aspirasi dari Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) di ruang aspirasi Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Selasa (1/12).

"Mewakili fraksi, saya menyampaikan dukungan atas upaya konstitusional yang ingin ditempuh setiap warga negara dalam menyikapi UU Cipta Kerja, karena itu dijamin oleh konstitusi dan undang-undang", ujar Ledia.

la menjelaskan bahwa memang terdapat sejumlah kecacatan formil maupun materiil yang bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi.

"Jika fokusnya pada hal-hal formil, kita dapat melihat sejumlah proses yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan, kami sebagai anggota DPR tidak mendapat draft final saat Paripurna. Dalam hal ini, Fraksi PKS telah coba perjuangkan ini di ranah parlemen, tetapi masih belum berhasil", ungkapnya.

Ledia pun menyebutkan akan mempertimbangkan permohonan Gekanas agar Fraksi PKS mengirim saksi fakta dalam persidangan.

"Menjawab permintaan untuk saksi fakta, saya akan koordinasikan dahulu dengan fraksi. Mengingat, ini nantinya akan merepresentasikan sikap fraksi", pungkask anggota DPR dari Dapil Jawa Barat ini.

Sebagai catatan, dalam pertemuan itu, perwakilan

Gekanas menyampaikan niat mereka untuk mengajukan Judicial Review terhadap UU Cipta Kerja ke MK pada 7 Desember 2020. Mereka menilai bahwa UU Cipta Kerja merugikan dalam bidang ketenagakerjaan secara luas.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Badan Legislasi DPR RI

Mewakili fraksi, saya menyampaikan dukungan atas upaya konstitusional yang ingin ditempuh setiap warga negara dalam menyikapi UU Cipta Kerja, karena itu dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Jika fokusnya pada hal-hal formil, kita dapat melihat sejumlah proses yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan, kami sebagai anggota DPR tidak mendapat draft final saat Paripurna. Dalam hal ini, Fraksi PKS telah coba perjuangkan ini di ranah parlemen, tetapi masih belum berhasil

Terima Aspirasi DPRD
Kota Bandung

Aleg FPKS: Optimalisasi Kinerja Antar Pusat dan Daerah

KUTIPAN

Jakarta (01/12) – Anggota FPKS DPR RI Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi I, H. Teddy Setiady, S.Sos menerima aspirasi dari DPRD Kota Bandung berkaitan dengan kinerja dan kerjasama antar elemen.

Hal tersebut disampaikan di ruang Rapat Pleno Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, Selasa (01/12/2020).

Teddy menjelaskan, bahwa protokol covid-19 di daerah-daerah harus tetap dijalankan dengan baik dan benar walaupun masyarakat harus tetap bekerja untuk mencari nafkah dalam kondisi saat ini.

"Anggaran Pemerintah Daerah berasal dari Pemerintah Pusat, hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (Perpres). Hanya saja daerah bisa mendapatkan support anggaran pusat tersebut dari dana APBD," kata Teddy.

Teddy juga menambahkan, bahwa realokasi Anggaran

Pemerintah Daerah yang sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri agar dapat dimaksimalkan dengan baik.

"Rapat-rapat Pemerintah Daerah di hotel sudah diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat. Hal tersebut diperbolehkan karena terdapat aduan dari Asosisasi Hotel yang menyampaikan aspirasinya ke DPR RI," kata Teddy.

Teddy juga menjelaskan, bahwa APBN dan APBD memiliki multiflyer efek secara makro. Perputaran dana tersebut jika tepat dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Teddy juga mengatakan, bahwa objek dari Pengawasan DPR RI melingkupi seluruh wilayah, sedangkan DPRD Kota hanya sebagian yakni Kota. Hal tersebut disampaikan untuk memperjelas tupoksi pengawasan dalam bekerja agar lebih optimal.



Anggota FPKS DPR RI Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi I, **H. Teddy Setiady, S.Sos** menerima aspirasi dari DPRD Kota Bandung.

Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah yang sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri agar dapat dimaksimalkan dengan baik. "Rapat-rapat Pemerintah Daerah di hotel sudah diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat. Hal tersebut diperbolehkan karena terdapat aduan dari Asosisasi Hotel yang menyampaikan aspirasinya ke DPR RI



Marak Kasus Penyerobotan Tanah

Nasir Djamil: Harus Segera Diselesaikan!

KUTIPAN

Jakarta (01/12) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, menyampaikan bahwa kasus penyerobotan tanah yang marak terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat harus segera dituntaskan.

Hal ini disampaikannya saat menerima pengaduan dari masyarakat Pantura Kabupaten Tangerang di ruang aspirasi Fraksi PKS DPR RI, Selasa (01/12).

"Kasus semacam ini sudah sering terjadi dan pihak yang merebut tanah selalu menyuruh agar kasus (sengketa) ini dibawa ke pengadilan dan kepolisian. Mereka seperti yakin menang perkara", ujar Nasir menanggapi pemaparan data yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat.

Oleh sebab itu, Nasir menyatakan akan memperjuangkan hak tanah warga dengan menyampaikan masalah ini ke Menteri ATR/BNP.

"Saya akan sampaikan ke menteri agar segera dapat

menyelesaikan permasalahan ini. Saya pun akan sampaikan ini ke KSP", jelas anggota DPR dari Dapil Aceh ini.

Selain itu, lanjut Nasir, ia juga akan menyuruti Menkopohukum. Mengingat, berdasar laporan dari perwakilan warga, mereka kerap mendapat intimidasi dari sejumlah pihak karena memperjuangkan hak atas tanah sendiri.

"Tentu, ini harus diselesaikan dan dituntaskan. Tanah warga harus diberikan kepada warga, dan segera diberikan sertifikatnya atas nama mereka", pungkas Nasir.

Sebagai catatan, warga Kabupaten Tangerang ini protes karena tanah mereka dicatut dan sudah terbit Nomor Identifikasi Bangunan (NIB) atas nama orang lain. Menurut hitungan mereka, ada sekitar 900 hektar tanah di Kabupaten Tangerang yang tersebar di beberapa kecamatan, yang dikuasai hanya oleh tiga orang saja.\



Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, **Muhammad Nasir Djamil** (Kanan) saat menerima pengaduan dari masyarakat Pantura Kabupaten Tangerang di ruang aspirasi Fraksi PKS DPR RI, Selasa pagi (01/12).

Kasus semacam ini sudah sering terjadi dan pihak yang merebut tanah selalu menyuruh agar kasus (sengketa) ini dibawa ke pengadilan dan kepolisian. Mereka seperti yakin menang perkara. Oleh sebab itu, Saya akan sampaikan ke menteri agar segera dapat menyelesaikan permasalahan ini. Saya pun akan sampaikan ini ke KSP"



Masjid Baiturrahman

Dengan diberikan-nya nama Baiturrahman diharapkan bagi siapapun yang melakukan ibadah di masjid ini akan mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Sang Maha Pencipta.

Masjid Baiturrahman adalah salah satu masjid yang berlokasi di area Komplek MPR/DPR Senayan, tepatnya berada di sebelah kiri belakang gedung DPR-RI. Masjid Baiturrahman ini dibangun pada tahun 1993 dan diresmikan pada tanggal 28 Agustus 1997 oleh Bapak Wahono yang saat itu menjabat sebagai ketua MPR/DPR RI. Masjid ini berdiri di atas lahan sel

luas 2.000 m2 dan dengan luas bangunan sebesar 1.240 m2. Pada tahun 2007 bangunan masjid ini diperluas dengan menambahkan aula terbuka di depan masjid dengan luas ±200 m2. Masjid Baiturrahman ini keberadaannya lebih menonjol daripada gedung lain di kompleks wakil rakyat walaupun bangunannya tidak seluas gedung lain, hal ini disebabkan karena masjid ini terletak di area terpisah dengan lokasi tanah yang lebih tinggi.

Kata "Baiturrahman" memiliki makna yang sangat mulia yaitu "Rumah kasih sayang" dengan artian sebagai tempat dimana kita bisa mendapatkan kenyamanan dan limpahan kasih sayang yang ada. Dengan diberikannya nama Baiturrahman diharapkan bagi siapapun yang melakukan ibadah di masjid ini akan mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Sang Maha Pencipta. Selain itu keberadaan Masjid Baiturrahma n ini juga

diharapkan bisa memberikan kesejukan rohani ditengah hiruk pikuknya dunia politik Indonesia di kawasan kompleks MPR/DPR Senayan.

Bentuk keseluruhan dari masjid ini menyerupai pola bunga tanjung yang ditapi kelopaknya memiliki ujung lancip, serta mahkota bunga yang pendek dan sedikit menggelembung dibagian bawah lalu melancip keatas.

Pola bunga tanjung ini direpresentasikan dengan bentuk atap melancip yang bertumpuk seperti bunga dalam proses menuju mekar. Terdiri dari delapan lengkungan atap yang bertumpuk tiga dan memiliki ukuran panjang yang berbeda. Untuk panjang atap yang kedua lebih pendek daripada atap yang pertama, begitu pula antara atap kedua dan atap ketiga. Bagian tengah atap berupa kubah segi delapan dengan garis-garis lancip sebagai pembentuk sudut dan diatasnya diberi hiasan bertuliskan lafadz Allah.

Warna hijau tua pada atap yang dipadukan dengan warna hijau muda pada dinding masjid bertujuan untuk memberikan kesejukan kepada setiap jama'ah yang melangkahkan kaki melewati aula terbuka di



depan masjid yang menjadi pembatas area suci sebelum menaik tangga menuju ruang sholat utama, Anak tangga yang berjumlah 17 ini melambangkan jumlah raka'at dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Teras yang mengelilingi bangunan utama masjid ini tidak terlalu luas tetapi sangat lebih dari cukup untuk bisa menikmati keindahan eksterior pada masjid ini. Fasad (tampak depan) masjid ini berupa deretan dinding terbuka yang pada bagian atasnya melancip menyerupai ujung kelopak bunga tanjung. Terdapat kaligrafi bergaya khufi marubba yang menghiasi sisi atap masjid yang berada tepat diatas pintu masuk masjid ini. Khufi marubba adalah gaya kaligrafi yang disusun dari garis-garis horizontal dan vertikal yang membentuk sudut tegak lurus, marubba sendiri artinya adalah

kubus. Pagar langkan teras bersifat fungsional sekaligus memberikan estetis karena berbentuk kerawang segi delapan, sehingga angin yang berhembus bisa leluasa masuk tanpa halangan apapun. Di bagian samping teras terdapat bedug besar berdiameter 1,97 m dan panjang 3m, bedug ini dibuat dari kayu jati yang berasal dari hutan jati Blora. Untuk kulit pembuat bedug ini diimpor langsung dari Austria karena sulit untuk mendapatkan kulit yang lebarnya sesuai dengan diameter bedug di masjid ini. Untuk melengkapi bedug ini pada tahun 1998 Menteri Kehutanan Djamiluddin Suryohadikusumo memberikan kentongan yang terbuat dari kayuangka dengan ukiran jepara dengan diameter 0,5 m dan panjang 1,65 m sebagai hadiah untuk Masjid Baiturrahman ini





**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTV-DPR-RI)

***Nantikan
Setiap Akhir
Pekan***